

## **BAB II**

### **DINAMIKA KONFLIK RWANDA SEBAGAI *GENDER BASED VIOLENCE***

Pada bab ini secara eksplisit penulis menguraikan kondisi Rwanda dari konflik awal yang terjadi hingga berubah menjadi sebuah genosida pada 1994. Pada bagian pertama penulis menguraikan penyebab terjadinya serangkaian konflik Rwanda yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pada bagian kedua penulis menjelaskan mengenai tipologi konflik Rwanda dimana dalam tipologi ini Rwanda mengalami intensitas konflik berkepanjangan dan berubah menjadi sebuah genosida. Pada bagian ketiga dan keempat penulis menjelaskan mengapa dan bagaimana genosida Rwanda melibatkan unsur kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual sebagai strategi dan instrumen dalam proses berlangsungnya genosida. Kemudian pada bagian akhir penulis menguraikan pula peran komunitas internasional baik *non state actor* maupun *state actor* dalam upaya untuk menghentikan genosida tersebut.

#### **2. 1. Faktor dan Penyebab Konflik Rwanda**

Sebelum terjadinya genosida 1994, Rwanda mengalami polemik permasalahan yang berujung pada terjadinya serangkaian konflik, di mana konflik ini mempunyai keterkaitan terhadap konflik-konflik lainnya yang terjadi paska konflik tersebut telah usai. Konflik yang terjadi berulang kali mempunyai akar permasalahan yang kompleks, mulai dari penyebabnya hingga pemicunya, dan

penulis menganggap dari serangkaian konflik yang terjadi ini merupakan sebuah proses menuju genosida. Penulis berusaha menguraikan faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik tersebut dengan meminjam model analisa M.Brown mengenai *root and causes*. Dimana menurut Brown penyebab terjadinya suatu konflik internal tidak hanya bisa dijelaskan melalui satu variabel saja, tetapi juga membutuhkan variabel-variabel lainnya untuk bisa melihat lebih jauh keterkaitan mengapa suatu konflik bisa terjadi. Konflik yang terjadi di Rwanda dapat dilihat penyebabnya melalui *underlying causes* (sebab utama), dan *proximate causes* (sebab pemicu),<sup>54</sup> yaitu:

**Tabel 2.1 Causes of Conflict**

| Underlying causes  | Proximate Causes   |
|--|--|
| <b><i>Structural factors:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara yang lemah.</li> <li>• Masalah keamanan intrastate.</li> <li>• Geografis etnis.</li> </ul>                       | <b><i>Mass-level factors:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara merupakan bekas kolonialisasi.</li> <li>• Adanya kelompok lain yang memberikan intensif bagi kemerdekaan kelompok mereka.</li> <li>• Negara dengan etnis minoritas lebih rawan terhadap suatu konflik</li> </ul> |
| <b><i>Politic factors:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi politik yang diskriminatif</li> <li>• Ideologi nasional eksklusif.</li> <li>• Politik antar kelompok.</li> </ul> | <b><i>Elite-level factors:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem negara yang otoriter cenderung menghasilkan kebencian dan diskriminasi.</li> <li>• Nasionalisme dan kewarganegaraan didasarkan perbedaan etnis.</li> </ul>  |
| <b><i>Economic/social factors:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan ekonomi.</li> <li>• Adanya ekonomi yang diskriminatif.</li> </ul>                                     | <b><i>Mass-level factors:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem ekonomi yang tidak merata.</li> <li>• Adanya kesenjangan dalam standar hidup.</li> </ul>   |

<sup>54</sup>Michael E. Brown, *The Causes of Internal Conflict*, dalam <http://users.clas.ufl.edu/rnolan/3333internalconflict.html> diakses pada 29 April 2016 pukul 15:21 WIB

|   |   |
|---|---|
| <p><b><i>Cultural/perceptual factors:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi budaya terhadap minoritas.</li> <li>• Kebencian yang telah ada sejak lama.</li> </ul> | <p><b><i>Mass-level factors:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya stratifikasi antar etnis dan penghinaan.</li> <li>• Adanya propaganda yang terbentuk.</li> </ul> |
|---|---|

Pada tabel di atas, setiap poin yang berada dalam tabel mengimplikasikan penyebab dan pemicu konflik Rwanda secara garis besar, dan dari semua poin serta keempat faktor tersebut terjadi dalam setiap adanya konflik Rwanda yang bermunculan. Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya antara keterkaitan konflik satu dengan konflik lainnya dikarenakan penulis berasumsi pula bahwa dari adanya konflik pertama yang terjadi dan tidak terselesaikan dengan *win win solution* akan menyebabkan konsekuensi terjadinya konflik yang terus berulang dimasa yang akan datang. Berikut analisis penulis terhadap sebab utama dan pemicu konflik Rwanda melalui tabel yang telah penulis paparkan:

### **2. 1. 1. Faktor Struktur**

Melihat penyebab dan pemicu pertama dalam faktor struktural mengenai perseteruan antara etnis Hutu dan etnis Tutsi dapat dilacak hingga masa kolonialisasi.<sup>55</sup> Ketika Jerman dipaksa mundur dari wilayah Rwanda selepas usainya Perang Dunia pertama, Belgia datang menggantikan posisi Jerman pada tahun 1916. Sebelum pihak Belgia memperparah hubungan antar etnis Rwanda, Jerman yang terlebih dulu datang telah membawa dan mengaplikasikan *racist ideology* kepada etnis

<sup>55</sup> Faktor struktural dimaksud sebagai sebuah faktor yang mencakup masalah administrasi yang tersusun atau terencana dan berbagai macam bentuk peraturan yang telah dibentuk, dan sebagai sebuah faktor yang melihat masyarakat sebagai sebuah sistem atau bagian-bagian yang saling memiliki hubungan.

yang ada.<sup>56</sup> Hasilnya, etnis Tutsi dianggap terlihat mendekati ras Eropa karena fisik mereka yang menunjang seperti memiliki tinggi tubuh yang baik, warna mata dan kulit yang terlihat lebih cerah, dan diasumsikan terlahir sebagai etnis yang akan memimpin Rwanda.<sup>57</sup> Selain itu, pihak Jerman yakin bahwa institusi kompleks yang ada di Rwanda sebelum kedatangan mereka telah dibangun secara eksklusif oleh Tutsi, sementara Hutu hanya dianggap sebagai golongan bawah yang merupakan budak pelayan Tutsi.<sup>58</sup> Ketika ideologi ras telah terapkan di seluruh Rwanda, melahirkan sebuah asumsi yang memandang Tutsi sebagai etnis superior karena memiliki fisik yang lebih unggul, sedangkan Hutu dipandang sebagai etnis inferior.

Memasuki era kolonial baru, ketegangan hubungan antara etnis Hutu dan Tutsi menjadi lebih buruk karena diberlakukannya *race identity* (kartu etnis) oleh pihak Belgia.<sup>59</sup> Selain itu, melihat angka populasi kependudukan Rwanda banyak didominasi oleh Hutu yang menjadikannya sebagai etnis mayoritas, sementara Tutsi memiliki angka

---

<sup>56</sup> Menurut David T. Wellman rasisme merupakan sebuah ideologi yang berasal dari sejarah dan struktur bangsa Eropa melalui individu maupun institusi yang berguna untuk mendapatkan suatu hasil. Mekanisme yang tercipta dari adanya ideologi ras pada umumnya akan merugikan atau merusak populasi yang tidak dianggap sebagai kaum putih. Ideologi ras biasanya akan menggunakan warna kulit, jenis kelamin, kelas, ataupun etnis dan kebangsaan. Dalam [http://www.euroamerican.org/Library/Definitions\\_Racism.asp](http://www.euroamerican.org/Library/Definitions_Racism.asp) diakses pada 16 Maret 2017 pukul 17:02 WIB

<sup>57</sup> Kedatangan Jerman sebagai kolonial pertama di Rwanda tidak hanya mempraktikkan ideologi ras terhadap etnis yang ada, akan tetapi juga menggunakan *Hamitic Myth* dengan tujuan untuk melihat apakah ada golongan etnis yang masih berasal dari garis keturunan atau silsilah bangsa Eropa.

<sup>58</sup> Anup Shah, *Rwanda*, Global Issues, dalam <http://www.globalissues.org/article/429/rwanda> diakses pada 16 Maret 2017 pukul 18:21 WIB

<sup>59</sup> Kartu etnis yang diberlakukan ini merupakan warisan gagasan ideologi ras yang dibawa oleh Jerman, kemudian lebih dikembangkan oleh pihak Belgia dengan cara melakukan penilaian fisik. Penilaian fisik yang ada dilakukan dengan cara mengukur tinggi badan, hidung, dan melihat warna kulit serta warna mata yang lebih cerah. Dari adanya kartu etnis ini menentukan identitas apakah individual tersebut seorang Tutsi atau Hutu.

populasi yang tidak sebanding dan menjadikannya sebagai etnis minoritas. Atas minoritasnya Tutsi tersebut, pihak Belgia melihat hal ini menjadi sebuah keuntungan, karena ketika mereka menggandeng Tutsi sebagai aliansi yang hanya memiliki jumlah kependudukan relatif lebih sedikit daripada Hutu maka akan mudah untuk tetap terus melakukan doktrinasi maupun pengaplikasian nilai-nilai lainnya demi menciptakan hegemoni bersama dan pengontrolan institusi Tutsi apabila tercipta pada nantinya.<sup>60</sup> Di lain sisi, dampak dari keminoritasan tersebut menyebabkan pula pihak Belgia memberikan segala bentuk dukungan kepada Tutsi baik dalam bentuk pendidikan, fasilitas pembangunan, dan pekerjaan, sementara Hutu tidak. Kemudian, pihak Belgia turut memberikan wewenang kepada elit Tutsi untuk menarik dan mengelola pajak wilayah dan lembaga maupun institusi yang ada di Rwanda entah itu yang dimiliki sendiri oleh Hutu ataupun Tutsi sipil.<sup>61</sup>

Atas perilaku istimewa yang merupakan strategi pihak Belgia tersebut, hubungan aliansi yang dibangun bersama Tutsi menjadi lebih kuat, berbeda dengan pihak kolonial sebelumnya. Akan tetapi Tutsi tidak menyadari tujuan lain dari pihak Belgia yang dalam jangka panjangnya akan memanfaatkan aliansi tersebut untuk memonopoli wilayah dan mempolarisasi perpolitikan antar etnis Rwanda. Adapun dampak lain yang hadir dari hal tersebut menimbulkan rasa iri dari pihak Hutu, belum lagi ditambah dengan ratifikasi etnis yang pada akhirnya

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

mendiskriminasi mereka turut melahirkan benih kebencian terhadap etnis Tutsi karena kesuperioritasannya. Semakin terdiasporanya hal tersebut menciptakan intensitas ketegangan hubungan antar etnis yang semakin tinggi dan turut mengantarkannya pada terbelahnya kedua etnis ini.

Lebih lanjut, ketika Tutsi telah memiliki otoritas dan menempati kursi kekuasaan tertinggi di Rwanda, pada tahun 1950 elit Tutsi yang turut pula mengakomodir Tutsi sipil untuk keluar dari sistem yang didirikan oleh pihak kolonial.<sup>62</sup> Seketika pada saat itu pihak Belgia merasa dikhianati oleh Tutsi dan beralih pada penciptaan aliansi baru bersama etnis yang mereka abaikan sebelumnya, yaitu Hutu. Dengan adanya aliansi baru ini, pihak Belgia mulai mengembalikan otoritas Hutu yang sebelumnya diberikan kepada Tutsi, dan mulai menggantikan kepemimpinan elit-elit Tutsi dengan Hutu. Memasuki pada tahun 1959 dimana ketegangan diantara kedua etnis ini telah pecah, pihak Belgia memperbolehkan Hutu untuk menyerang dan menghancurkan fasilitas yang telah dibangun oleh Tutsi, ditambah lagi adanya kelompok-kelompok elit Hutu yang memberikan intensif untuk memerdekakan Rwanda dari pihak kolonial turut menjadi pemicu perpecahan pertama ini.<sup>63</sup> Dalam merdekanya Rwanda pada saat itu, terjadi masa transisi sistem monarki yang dibangun oleh Tutsi menjadi sistem pemerintahan

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Tor Sellström and Lennart Wohlgemuth, 1996, *The International Response to Conflict and Genocide: Lessons From the Rwanda Experience*, Historical Perspective: Some Explanatory Factors, Study 1, Copenhagen: Steering Committee of the Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, hal 26, dalam <https://www.oecd.org/derec/unitedstates/50189653.pdf> diakses pada 13 Maret 2017 pukul 14:22 WIB

republik yang baru, dan ini adalah hal momentum bagi Hutu untuk terus melakukan penyerangan terhadap Tutsi hingga menggulingkan Kigeli V yang merupakan raja Tutsi menggantikannya dengan Grégoire Kayibanda sebagai presiden Rwanda pertama.<sup>64</sup>

Dapat dilihat pada bagian ini penyebab utama terjadinya konflik berada pada permasalahan geografis etnis yang terbelah atas adanya ratifikasi etnis yang dilakukan oleh pihak Belgia. Dari hal tersebut memunculkan masalah keamanan karena adanya diskriminasi terhadap etnis mayoritas, ditambah lagi Rwanda menjadi negara yang lemah karena segala bentuk otoritas dan sistem dikendalikan oleh pihak kolonial. Kemudian pemicu utamanya ketika elit Hutu mencoba untuk memerdekakan kelompok mereka dari pihak kolonial yang bersamaan pada saat Rwanda menjadi negara independen dan mengalami perubahan sistem monarki menjadi sistem republik, hal lain yang mendorong perpecahan pertama pada tahun 1959 ialah adanya asumsi Hutu sebagai etnis mayoritas yang seharusnya memegang kendali Rwanda, bukan etnis minoritas yang dikarenakan diberikan wewenang dan otoritas dari pihak kolonial.

### **2. 1. 2. Faktor Politik**

Pandangan lain yang dapat ditarik mengenai konflik Rwanda ialah karena adanya pengaruh sistem dualisme politik yang diciptakan oleh

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

pihak kolonial, dimana dualisme ini berorientasi kepada cara untuk mendapatkan kekuasaan dan menggapai kepentingan-kepentingan pihak kolonial dalam Rwanda. Pada periode awal kolonial, Jerman mengenalkan Rwanda pada proses modernisasi yang tidak saja dibangun dalam kelas ataupun kasta etnis mereka, tetapi juga dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.<sup>65</sup> Sebelum hal itu, Rwanda sendiri telah mempunyai sistem politik sendiri dalam sistem monarkinya akan tetapi atas usaha pihak Jerman dalam membangun aliansi menyebabkan dinamika sosial dan politik Rwanda turut berubah.<sup>66</sup> Perubahan yang dilakukan ini dipengaruhi oleh adanya *racist ideology* dan *Hamitic myth* sebagai landasan utamanya yang dibawa oleh pihak Jerman, dan menghasilkan Tutsi sebagai aliansinya memiliki pengaruh terhadap sistem politik etnis pribumi yang dominan dalam Rwanda.<sup>67</sup> Seperti yang penulis sebutkan dalam bagian sebelumnya, *racist ideology* yang diaplikasikan pihak Jerman dalam upayanya untuk mengubah sistem perpolitikan Rwanda, menghadirkan Tutsi sebagai etnis superior yang memegang kendali pemerintahan sementara Rwanda dibawah pengawasan kolonial.

Ketika memasuki era kolonialisasi Belgia, ratifikasi etnis yang terlahir dalam bentuk kartu identitas turut menyumbang pengaruh

---

<sup>65</sup> Pada faktor politik memiliki artian sebagai sebuah faktor yang krusial dalam tatanan sebuah pemerintahan, dimana faktor ini merupakan sebuah proses untuk menciptakan kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat melalui pembuatan kebijakan.

<sup>66</sup> Anton Scholz, 2015, *Hutu, Tutsi, and the Germans: Racial Cognition in Rwanda Under German Colonial Rule*, Master Thesis, Netherlands: Faculty of Humanities, hal 16-22 dalam <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/35741/MA%20Thesis%20Anton%20Scholz.pdf?sequence=1> diakses pada 14 Maret 2017 pukul 20:46 WIB

<sup>67</sup> *Ibid.*



terhadap perubahan politik Rwanda. Pasalnya dari hal tersebut menyebabkan nasionalisme dan kewarganegaraan Rwanda didasari oleh perbedaan etnis yang ada, dimana superioritas yang dianggap milik etnis Tutsi dalam kartu tersebut memperbolehkan mereka melakukan akses apa saja dan dimana saja, seperti halnya dalam pembuatan lembaga ataupun institusi-institusi diberbagai wilayah Rwanda, sementara Hutu tidak.<sup>68</sup> Akan tetapi penulis melihat kartu etnis yang diberlakukan tersebut tidak saja bertujuan untuk membeda-bedakan etnis, tetapi juga sebagai penanda kelas sosial atau kasta baru di era kolonial, dan dapat dikatakan pula kartu etnis ini ialah bentuk sebuah propaganda yang diciptakan pihak kolonial untuk mempolitisasi dan mempolarisasi perpecahan etnis demi mendapatkan keuntungan politik kolonialisasi. Adanya unsur monopoli politik yang digunakan pihak kolonial terhadap kedua etnis tersebut pada awalnya hanya bertujuan untuk pengeksploitasian sumber daya alam dan penguasaan wilayah Rwanda lainnya, akan tetapi dilain sisi pihak kolonial menjadi terlalu rakus akan kekuasaan absolut dalam Rwanda dan hal ini justru menciptakan efek domino kepada dua etnis yang terlibat, dimana mereka turut juga menginginkan dan memperebutkan kekuasaan atas Rwanda.<sup>69</sup>

Ketika Tutsi menempati posisi hirarki sosial tertinggi dalam Rwanda, tidak heran perannya dalam mengeksploitasi etnis Hutu menunjukkan perilaku otoriter demi mewujudkan kepentingan satu

---

<sup>68</sup> Sellström and Wohlgemuth, *Op. Cit.*, hal 9-10.

<sup>69</sup> *Ibid.*

golongan. Dari hal tersebut menjadi pemicu awal terciptanya sistem otoriter yang terwaris dalam kepemimpinan Rwanda setelah masa transisi kemerdekaan. Sehingga tidak mengherankan ketika Kayibanda memimpin Rwanda pada tahun 1962, ia turut menerapkan sistem otoriter yang melahirkan kebijakan opresif untuk mengontrol tingkat populasi Tutsi dengan cara melakukan pembunuhan yang berskala. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan status quo Hutu dalam Rwanda agar tidak tergantikan lagi oleh Tutsi.<sup>70</sup>

### **2. 1. 3. Faktor Ekonomi**

Wilayah Rwanda sebagian besar merupakan area pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya ekonomi diluar dari potensi agrikultur mereka yang berkembang. Bahkan masyarakat yang hidup diwilayah perkotaan masih menggantungkan hidup mereka kepada produksi hasil agrikultur yang ada di area pedesaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>71</sup> Dilain sisi, dari hasil produksi yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi konsumsi domestik, digunakan pula sebagai penyanggah perekonomian negara dalam proses ekspor dan impor yang dihasilkan dari agrikultur tersebut, sehingga dapat dilihat perekonomian maupun pendapatan negara Rwanda hanya mengandalkan

---

<sup>70</sup> Government of The Republic Rwanda, *RPF: Story About Rwanda*, dalam <http://www.rwandahope.com/rpfhistory.pdf> diakses pada 14 Maret 2017 20:31 WIB

<sup>71</sup> Faktor ekonomi diartikan sebagai sebuah faktor yang menggambarkan mengenai pengelolaan atau administrasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup baik dalam lingkungan perorangan, masyarakat, dan negara.

hasil agrikulturnya saja.<sup>72</sup> Dalam potensi agrikultur yang dimiliki oleh Rwanda telah dikembangkan semenjak proses modernisasi yang dikenalkan oleh pihak kolonial. Dari agrikultur tersebut Rwanda hanya mempunyai dua hasil pertanian namun hanya satu saja yang menjadi unggulan dan sekaligus pula menjadi ujung tombak pembangunan perekonomian Rwanda, yaitu hasil produksi biji kopi yang memberikan kontribusi sekitar 80% untuk pendapatan negara.<sup>73</sup>

Memasuki pergantian rezim pada tahun 1975 ketika posisi Kayibanda digantikan oleh Juvénal Habyarimana sebagai presiden, Rwanda mengalami kemerosotan ekonomi hingga 40% dalam kurun waktu empat tahun selama ia menjabat. Sementara penulis melihat adanya pergantian rezim ini menandakan ketidakmampuan Habyarimana untuk menjaga kestabilan perekonomian Rwanda yang tadinya dapat dikatakan cukup signifikan dalam pertumbuhannya.<sup>74</sup> Hal lain yang membuat Rwanda mengalami kemerosotan ekonomi dikarenakan pula komoditas harga kopi Rwanda mengalami penurunan dimulai dari tahun 1980an, dan hanya menghasilkan 50% saja untuk pendapatan negara. Laporan dari Bank Dunia turut menyebutkan GDP Rwanda yang sebelumnya tumbuh 4,7% pada tahun 1970 hingga 1979 merosot menjadi 2,2% pada tahun 1980 hingga 1988, dan terus mengalami penurunan

---

<sup>72</sup> David Newbury, *Ecology And The Politics Of Genocide: Rwanda 1994*, Cultural Survival Quarterly Magazine, Issue: Human Rights, Desember 1998, dalam <https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/ecology-and-politics-genocide-rwanda-1994> diakses pada 14 Maret 2017 pukul 11:08 WIB

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Sellström and Wohlgemuth, *Op. Cit.*, hal 11.

hingga pada tahun-tahun berikutnya sebelum pecahnya genosida 1994. Selain itu, GDP perkapita dilaporkan juga mengalami penurunan dimana pada tahun 1989 GDP perkapita sekitar 330 US Dollar kemudian menjadi 200 US Dollar hingga tahun 1993.<sup>75</sup>

Setidaknya terdapat pula empat faktor sosial ekonomi yang berada dilevel masa yang tertuju pada pemicunya genosida 1994. *Pertama*, pada saat harga kopi yang tiba-tiba jatuh pada tahun 1989 terjadi pula devaluasi mata uang serta inflasi. *Kedua*, pada tahun 1990 program yang dikeluarkan Bank Dunia dan IMF yang kemudian di adopsi oleh Habyarimana untuk pemulihan perekonomian Rwanda menjadi gagal karena dibagian selatan Rwanda dilanda masalah kekeringan dimana dalam kondisi ini berubah menjadi masalah kelaparan dan menonjolkan kesenjangan ekonomi.<sup>76</sup> *Ketiga*, konflik yang terjadi pada tahun 1990 dibagian utara Rwanda menyebabkan pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk membiayai kemiliteran, dan dampak dari konflik tersebut menyebabkan hadirnya kamp pengungsian dalam skala besar. *Keempat*, proses demokratisasi yang terjadi di Afrika menyebabkan terbentuknya kelompok oposisi diwilayah masing-masing yang siap

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hal 19.

<sup>76</sup> *Structural Adjustment Program* (SAP) ialah program bantuan ekonomi yang di usung oleh Bank Dunia dan IMF kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis ekonomi. Ketika Rwanda menunjukan cirinya sebagai *fail state*, SAP diberikan dengan persyaratan program reformasi kebijakan ekonomi makro dan liberalisasi ekonomi. Namun, dengan kondisi perpolitikan Rwanda yang mulai kotor pinjaman uang tersebut menimbulkan ketimpangan, dan hanya diproses masuk oleh elit Hutu saja.

melakukan kudeta kepada pemerintahan. Dari keempat faktor tersebut menjadi pemicu utama dalam jalannya genosida 1994.<sup>77</sup>

Namun penulis juga melihat dari studi dan sumber-sumber lainnya, perekonomian Rwanda yang telah tumbuh semenjak era kolonial telah menunjukkan adanya ketimpangan dan kemakmuran disatu pihak saja. Dengan kata lain pada saat itu hanya elit Tutsi saja yang mengontrol perekonomian Rwanda, dan begitu pula sebaliknya ketika Hutu mulai mengambil alih pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh keotoritasan dan wewenang di setiap elit etnis masing-masing pada masanya untuk mengatur kebijakan, hak, pajak, dan pembagian-pembagian lainnya. Adanya sistem ekonomi diskriminatif yang telah tumbuh lama ini menyebabkan kesenjangan dalam standar hidup dalam golongan etnis tersendiri dan terus terwariskan, sehingga jarak antara golongan kaya dan miskin semakin jauh melebar. Berangkat dari hal tersebut, ketimpangan ekonomi yang terus tumbuh dan tidak dapat distabilkan yang menyebabkan Rwanda mengalami krisis ekonomi dan menjadi pemicu pecahnya serangkaian konflik hingga mencapai puncaknya, yaitu genosida 1994.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Rodrigo, *Analyze The Causes of The Rwandan Genocide*, The Writepass Journal; Free essays, dalam <https://writepass.com/journal/2012/12/analyze-the-causes-of-the-rwandan-genocide/> diakses pada 12 Maret 2017 pukul 13:37 WIB

<sup>78</sup> *Ibid.*

#### 2. 1. 4. Faktor Kultur/Budaya

Adanya intervensi pihak kolonial dalam perombakan struktur Rwanda menyebabkan berubahnya pula faktor kultur yang kemudian menjadi salah satu pemicu pecahnya konflik.<sup>79</sup> Masuknya Jerman sebagai koloni pertama di Rwanda membawa keyakinan mereka terhadap *Hamitic thesis* untuk mengaplikasikan ideologi ras. Dalam tesis ini menyebutkan semua hal yang terlihat baik dan berharga dari diri individual seorang African merupakan hasil keturunan ras Hamites yang juga menjadi cabang dari ras Kaukasia. Bagi bangsa Eropa hal yang menarik dan dapat dibuktikan melalui tesis *Hamitic* ini ialah karakteristik fisik yang menyerupai bangsa Eropa namun memiliki warna kulit yang sedikit kecoklatan.<sup>80</sup> Adanya mitos yang terkandung dalam *Hamitic thesis* turut menyebutkan golongan Hamites yang terlahir akan dianggap menjadi seorang pemimpin dan mempunyai hak untuk menuliskan sejarah bagi ras yang berada dibawahnya. Sementara dalam Rwanda, golongan Hamites ialah Tutsi karena memiliki karakter fisik yang tidak seperti pada umumnya ras Afrika lainnya.<sup>81</sup>

Atas adanya hipotesa mengenai *Hamitic thesis* inilah yang menjadi penggerak pertama bagi pihak kolonial untuk melakukan penggolongan etnis dan memilih Tutsi sebagai aliansi mereka. Kemudian di lain sisi, *Hamitic thesis* ini terus dimanfaatkan dan dikembangkan pihak kolonial

---

<sup>79</sup> Faktor budaya dalam bagian ini dimaksudkan sebagai sebuah pola pikir budaya yang pada awalnya telah tersusun dan terwariskan oleh generasi-generasi terdahulu kemudian mengalami perubahan seiring karena terciptanya golongan-golongan baru yang memiliki otoritas lebih.

<sup>80</sup> Sellström and Wohlgemuth, *Op. Cit.*, hal 26.

<sup>81</sup> *Ibid.*

dalam upayanya untuk melakukan reformasi administrasi etnis pribumi serta pengurangan pemimpin kepala adat Hutu, dimana pada saat itu Hutu mempunyai kepemilikan lahan yang lebih besar dari pada Tutsi.<sup>82</sup> Strategi ini digunakan pihak kolonial untuk mendapatkan wilayah eksploitasi yang lebih luas melalui aliansinya, sehingga dapat dikatakan pula Jerman mengkolonialisasi Rwanda melalui Tutsi.

Ketika Tutsi berhasil menggantikan kepemilikan tanah Hutu, pihak kolonial mengeluarkan kebijakan yang melindungi posisi Tutsi dengan alasan bahwa Tutsi merupakan ras yang berhak memiliki kekuasaan wilayah yang luas dan merupakan ras yang terbaik dalam memimpin Rwanda menuju proses modernisasi.<sup>83</sup> Akan tetapi penulis melihat tujuan sebenarnya dibalik dari alasan tersebut ialah bentuk upaya ataupun propaganda pihak kolonial untuk mendorong hegemoni Tutsi dalam memonopoli wilayah Hutu. Doktrin dan propaganda pertama ini berhasil diselipkan pihak kolonial ke dalam *Hamitic thesis* yang membuat Tutsi percaya bahwa etnis mereka ialah etnis yang superior dan berhak memegang kuasa atas Rwanda.

Dampak dari adanya kebijakan pertama yang diterapkan oleh pihak kolonial kepada Tutsi untuk memperoleh otoritas Tutsi melalui etnis pribumi lainnya, menyebabkan Hutu dan Twa tidak mempunyai kesempatan untuk dapat berpartisipasi ataupun menentang segala kebijakan dan peraturan opresif yang diadaptasi oleh Tutsi dari pihak

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>83</sup> *Ibid*.

kolonial. Ditambah lagi dengan adanya ratifikasi etnis dalam bentuk kartu identitas yang sebelumnya telah penulis jelaskan, membuat Hutu semakin terdiskriminasi, seperti contohnya dalam bidang pendidikan. Sekolah katolik yang didirikan oleh pihak kolonial hanya memperbolehkan Tutsi untuk bersekolah disana, sementara Hutu tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik. Hal ini dikarena pula adanya unsur politik dominan ataupun kepentingan satu golongan dalam sistem regulasi sekolah tersebut.<sup>84</sup> Pada akhirnya Hutu hanya diperbolehkan mendapat akses pendidikan dalam bidang pertanian, tambang, maupun bentuk industri-industri lainnya dimana hal tersebut menjadikan posisi mereka hanyalah sebagai seorang pekerja kasar. Sementara penulis melihat adanya kesenjangan dalam bidang pendidikan ini merupakan bentuk strategi pihak kolonial dalam menciptakan jarak diantara etnis yang ada, dan menjaga keminoritasan Tutsi sebagai etnis superior untuk mengendalikan etnis pribumi lainnya yang tidak memiliki kepandaian seperti Tutsi dalam bidang pendidikan.

Dampak yang dihasilkan dari propaganda dan ratifikasi etnis oleh pihak kolonial menyebabkan lahirnya budaya diskriminasi antar etnis. Pada awalnya Tutsi mendiskriminasi Hutu atas kelas inferior mereka, kemudian ketika Rwanda lepas dari genggaman pihak kolonial dan Hutu mendapatkan posisi mereka dalam pemerintahan Rwanda, mereka mewarisi hal tersebut dan kembali melakukan diskriminasi terhadap

---

<sup>84</sup> *Ibid.*



Tutsi dengan andil Tutsi bukanlah etnis asli Rwanda karena keminoritasan mereka.<sup>85</sup> Diskriminasi yang telah membudaya ini terus tumbuh dalam sifat saling membenci diantara Hutu dan Tutsi, dan menjadikan hal ini sebagai salah satu dorongan terhadap hadirnya bentuk-bentuk propaganda lainnya dalam terjadinya serangkaian konflik hingga genosida 1994.

Melalui *underlying* dan *proximate causes* konflik model Brown, penulis melihat konflik Rwanda yang berulang kali terjadi sangatlah kompleks. Pasalnya, tidak hanya satu faktor atau variabel saja yang dapat menjelaskan dan menjadi pemicu pecahnya konflik tersebut, tetapi merupakan kombinasi beberapa faktor sekaligus yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Dari empat faktor penyebab dan pemicunya konflik Rwanda yang telah penulis uraikan, penulis mengasumsikan bahwa sebab utama genosida 1994 berasal dari permasalahan yang telah ada semenjak masa kolonial. Dimana pada saat itu pihak kolonial melakukan intervensi dalam sistem yang telah terbentuk dan melakukan politik adu domba diantara etnis pribumi yang ada. Sehingga tidak heran menjalarnya permasalahan satu ke permasalahan lainnya yang mempengaruhi munculnya konflik Rwanda telah berasal dari warisan yang telah ada semenjak masa kolonial.

Seperti adanya proses strukturisasi ulang sistem pribumi yang kemudian di intervensi dan di perbaharui oleh pihak kolonial, dilakukannya proses doktrin dan propaganda yang diselipkan dalam praktek ideologi ras dan pengaplikasian

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

*Hamitic thesis*, serta stratifikasi etnis yang tertuang dalam bentuk kartu etnis.<sup>86</sup>

Penulis melihat pula digunakannya ideologi ras dan tesis tersebut sebagai strategi utama untuk membangun rasa percaya terhadap etnis yang terpilih menjadi aliansi merasa etnis mereka superior dan mempunyai hirarki sosial tertinggi diantara etnis pribumi lainnya serta berhak menduduki kursi pemerintahan. Oleh sebab itu ketika telah terjalinnya aliansi diantara kedua belah pihak, Tutsi diberikan hak istimewa untuk menata ulang strata sosial yang ada dan mengatur segala bentuk regulasi etnis pribumi.

Dari hal tersebut, pada awalnya Hutu memiliki rasa iri yang besar terhadap perilaku istimewa pihak kolonial terhadap Tutsi, namun tidak disangka berangkat dari rasa iri tersebut menjadi sebuah rasa benci yang terus tertanam dari generasi ke generasi Hutu selanjutnya. Dilain sisi pula, semakin tingginya kuasa Tutsi dalam sistem monarkinya, melahirkan budaya diskriminatif dalam kebijakan dan peraturan yang opresif yang menyebabkan Hutu terdiskriminasi dari hal tersebut. Sehingga tidak heran genosida yang terjadi pada tahun 1994 dapat dikatakan sebagai mini *holocaust* yang terjadi di Afrika merupakan pembalasan atas dendam etnis Hutu kepada Tutsi.<sup>87</sup>

**Tabel 2.2 Penyebab Utama dan Pemicu Konflik**

| <i>Penyebab Utama</i>   | <i>Penyebab Pemicu</i>  |
|---|---|
| <b><i>Faktor Struktural:</i></b> Rwanda memiliki geografis etnis yang terbelah menjadi tiga antara Hutu, Tutsi dan Twa, dan sebelum kependudukan pihak kolonial | <b><i>Level Masa:</i></b> Ketika perebutan hirarki sosial antara Hutu dan Tutsi semakin memuncak pada tahun 1959 turut hadir pula sebuah kelompok yang didominasi |

<sup>86</sup> Sellström and Wohlgemuth, *Op. Cit.*, hal 26-27.

<sup>87</sup> *Ibid.*

|  |   |
|--|---|
| <p>ketiga etnis ini hidup dengan sistem monarki dan terbagi menjadi tiga kasta yaitu Hutu sebagai petani, Tutsi sebagai peternak, dan Twa sebagai pemburu. Diantara ketiga etnis ini Tutsi dianggap mempunyai hirarki sosial yang tertinggi sebagai peternak. Kemudian ketika pihak kolonial menduduki Rwanda dengan membawa <i>racist ideology</i> sebagai langkah awal untuk membelah ketiga etnis ini dan bertujuan pula untuk menjalin aliansi dengan etnis yang dianggap superior menghasilkan masalah keamanan intrastate dan menjadikan Rwanda sebagai negara yang lemah.</p> | <p>elit Hutu untuk mengupayakan Rwanda terbebas dari genggaman pihak kolonial, sehingga pada tahun 1959 terjadi gelombang revolusi pertama yang dikenal dengan <i>Hutu Revolution</i> sebagai upaya untuk memerdekakan Rwanda dan sekaligus pula merombak sistem monarki menjadi pemerintahan republik. Akan tetapi dilain sisi, dengan kondisi Rwanda sebagai negara bekas kolonialisasi dan menyisakan kecemburuan sosial yang ada menjadikan kondisi Tutsi sebagai etnis minoritas yang rentan terhadap terjadinya konflik .</p>   |
| <p><b>Faktor Politik:</b> Institusi politik diskriminatif ditandai dengan lahirnya kartu etnis yang diberlakukan oleh pihak Belgia untuk menegaskan identitas etnis di setiap individual masyarakat Rwanda, mengingat lagi pada saat itu etnis Tutsi sebagai aliansi pihak kolonial menyebabkan mereka mendapatkan hak istimewa dari pada etnis lainnya, sehingga dari hal ini mendorong pula hadirnya ideologi nasional eksklusif dari kalangan pihak kolonial dan elit etnis Tutsi.</p>  | <p><b>Level Elit:</b> sistem otoriter pertama terlahir ketika masa kolonial dimana Tutsi memegang penuh otoritas perpolitikan etnis yang ada dan menduduki posisi hirarki sosial tertinggi diantara etnis pribumi yang ada, dan dalam peran eksploitasi Tutsi terhadap Hutu dalam pengelolaan bidang pertanian dan peternakan melahirkan perilaku yang otoriter demi mewujudkan kepentingan etnis Tutsi sendiri baik Tutsi elit maupun Tutsi sipil, sehingga dalam konteks ini ketika kekuasaan Rwanda dipegang oleh etnis Hutu tidak heran sistem otoriter ini terus terlahir sebagai wujud dari balas dendam mereka atas penindasan etnis Tutsi pada masa kolonial.</p> |
| <p><b>Faktor Ekonomi:</b> Ekonomi diskriminatif Rwanda telah ada ketika Tutsi diberikan otoritas dalam mengatur segala kebijakan etnis pribumi oleh pihak kolonial, dimana hal ini menyebabkan terciptanya kesenjangan antara golongan kaya dan miskin semakin jauh. Kemudian permasalahan ekonomi Rwanda yang menjadi penyebab konflik berada pada pergantian rezim Kayibanda ke Habyarimana pada tahun 1975, selang</p>  | <p><b>Level Masa:</b> Lahirnya kesenjangan dalam standar hidup dalam masyarakat Rwanda disebabkan oleh adanya kelas-kelas yang tercipta diantara etnis Hutu dan Tutsi, dimana kelas-kelas ini sendiri terlahir karena adanya kepentingan-kepentingan kelompok yang harus dicapai, sehingga tidak terkadang golongan masyarakat bawah yang tidak mampu menjadi terlupakan. Kemudian apabila melihat kondisi geografis Rwanda yang sebagian luas</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>pergantian rezim tersebut Rwanda terus mengalami kemerosotan ekonomi secara berskala dimulai dari jatuhnya harga ekspor kopi yang merupakan sebagai sumber pendapatan negara. Dari hal tersebut turut menciptakan inflasi dan nilai mata uang Rwanda menjadi jatuh, tidak berhenti hingga disitu pada tahun 1990 Bank Dunia dan IMF mengeluarkan pinjaman kepada Rwanda akan tetapi pinjaman tersebut hanya dikelola oleh elit pemerintahan saja, dengan kata lain bantuan tersebut tidak sepenuhnya di alihkan untuk memperbaiki perekonomian Rwanda tetapi hanya di nikmati oleh elit Hutu saja dalam kursi pemerintahan.</p>  | <p>merupakan wilayah pedesaan, menyebabkan perekonomian Rwanda hanya berpusat di wilayah perkotaan saja sehingga segala kebijakan maupun bantuan tidak sepenuhnya dapat disalurkan ke daerah pedesaan, hal ini yang menjadi pandangan bahwa sistem perekonomian Rwanda tidak merata ke seluruh wilayah-wilayah maupun ke lapisan-lapisan masyarakat lainnya.</p>   |
| <p><b>Faktor Budaya:</b> Lahirnya rasa benci antar etnis dimulai ketika pihak kolonial menduduki Rwanda dan memilih etnis Tutsi sebagai aliansi. Dalam aliansinya, etnis Tutsi diberikan segala hak istimewa dalam menentukan kebijakan etnis pribumi hingga mendapatkan fasilitas seperti pendidikan yang dalam sekolah katolik dimana etnis Hutu dan Twa tidak memperoleh hal tersebut. Dari kebencian yang terlahir dari rasa iri dalam kesenjangan sosial ini terus berkembang hingga Rwanda terlepas dari sistem kolonialisasi dan Hutu memperoleh kuasanya atas Rwanda, atas kuasanya tersebut dan mengingat bahwa Tutsi merupakan etnis minoritas di Rwanda Hutu mulai mendiskriminasinya sebagai bentuk dari tindakan balas dendam atas perilaku Tutsi kepada mereka di masa kolonialisasi.</p> | <p><b>Level Masa:</b> Seperti yang telah penulis uraikan pula, adanya ratifikasi etnis yang dilakukan pihak kolonial dengan mengadopsi nilai <i>Hamitic</i> menjadikan etnis Tutsi sebagai etnis superior dan memiliki keunggulan fisik yang menyerupai bangsa Eropa menyebabkan posisi Hutu tidak diperuntungkan dan menjadi tersingkirkan. Dilain sisi etnis Hutu turut menjadi etnis penghinaan karena kondisi fisik mereka seperti berkulit sangat gelap, bentuk wajah, dan bentuk fisik lainnya, kemudian karena kelas mereka merupakan kelas bawah dan tidak diberikan hak untuk memperoleh pendidikan yang baik seperti Tutsi menjadikan mereka dipandang hanya sebagai etnis yang bodoh dan lebih baik menjadi budak. Berangkat dari hal tersebut ketika akhirnya Hutu menggantikan posisi hirarki Tutsi lahir sebuah sistem yang diskriminatif sebagai wujud balas dendam, dan dari hal ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dorongan terhadap lahirnya bentuk-bentuk propaganda yang baru demi menghancurkan etnis Tutsi.</p> |

## 2. 2. Tipologi Konflik Rwanda

Pada umumnya tipologi konflik Rwanda merupakan konflik etnis yang disebabkan dengan adanya kecemburuan sosial, dan kesenjangan dalam hidup. Hutu merupakan golongan etnis bawah yang tertindas oleh hirarki Tutsi dan pihak kolonial mendapati etnis mereka memiliki keterbatasan akses dalam ranah publik dan menyebabkan hidup mereka serba kekurangan dalam berbagai aspek. Hal tersebut yang menjadi pengantar terjadinya serangkaian konflik Rwanda dari era kolonialisasi hingga masa demokratisasi, seperti:

1. Konflik 1959 hingga 1961 yang dikenal sebagai *Hutu Peasant Revolution* atau revolusi sosial Hutu yang mencoba untuk mengakhiri masa dominasi Tutsi dan merebut posisinya dalam kursi pemerintahan. Konflik pertama ini menelan ribuan nyawa Tutsi dan menyebabkan Tutsi mengungsi ke negara terdekat dengan Rwanda.<sup>88</sup>
2. Selama pengungsian dari tahun 1961 hingga 1967 Tutsi melakukan serangan balik yang merupakan aksi balas dendam atas terbunuhnya kerabat mereka dari konflik pertama yang terjadi, sekaligus pula sebagai upaya untuk merebut kembali posisi mereka di Rwanda.<sup>89</sup> Alhasil, semenjak konflik pertama pecah dan memasuki usainya konflik kedua

---

<sup>88</sup> Alan J. Kuperman, *Explaining the Ultimate Escalation in Rwanda: How and Why Tutsi Rebels Provoked a Retaliatory Genocide*, School of Advanced International Studies (SAIS), hal 3, dalam <http://www.gsdrc.org/docs/open/ss12.pdf> diakses pada 17 maret pukul 15:07 WIB

<sup>89</sup> *Ibid.*

pada 1967 tercatat 20.000 Tutsi telah dibunuh, dan sebanyak 300.000 jiwa lainnya melakukan pengungsian ke negara-negara tetangga.<sup>90</sup>

3. Pada tahun 1988, Tutsi yang mengungsi di Uganda membentuk sebuah gerakan politik yang berbasis militer yang bernama *Rwanda Patriotic Front* (RPF). Invasi yang dilakukan RPF dihadang oleh tentara *Forces Armées Rwandaise* (FAR) ketika menuju Kigali yang merupakan ibu kota Rwanda dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa pada tahun 1990.<sup>91</sup> Adapun motif RPF dari invasi ini untuk menyelesaikan krisis pengungsi yang menyebar dinegara-negara tetangga yang terhitung dalam skala besar, dengan tujuan lain ingin mengembalikan lagi posisi Tutsi ke Rwanda. Alasan lain juga ditunjukkan RPF sebagai pembersihan pemerintahan Rwanda yang melakukan praktek diskriminasi etnis, korupsi yang merajarela dan tidak demokratis.<sup>92</sup>

Selang hampir dua tahun kemudian paska invasi tersebut, akhirnya Habyarimana mendatangi kesepakatan perjanjian yang tertuang dalam *Arusha Accords* pada 4 Agustus 1993.<sup>93</sup> Dimana pada perjanjian perdamaian ini berisi tentang prinsip dan penciptaan supremasi hukum, pembagian kekuasaan dan pembuatan pemerintahan serta parlemen yang transisi bersama RPF,

---

<sup>90</sup> Annan, *Op. Cit.*, hal 21.

<sup>91</sup> FAR atau yang dikenal sebagai *Forces Armées Rwandaise* merupakan badan kemiliteran Rwanda yang berisikan etnis Hutu dan dibentuk oleh Habyarimana untuk menghalau segala bentuk bentuk ancaman maupun serangan yang ditujukan untuk mengganggu kestabilan Rwanda.

<sup>92</sup> Sellström and Wohlgemuth, *Op. Cit.*, hal 35.

<sup>93</sup> Selain desakan dari RPF yang menjadi faktor Habyarimana untuk mendatangi perjanjian perdamaian antara Hutu dan Tutsi, adanya pula intervensi yang dilakukan dari negara-negara lain untuk mengupayakan penyelesaian konflik internal Rwanda tersebut seperti Amerika dan Inggris, bahkan Belgia yang merupakan negara yang mengkoloni Rwanda turut mengupayakan hal tersebut pula.

mereintegrasi para Tutsi yang mengungsi, menciptakan kemiliteran bersama antara RPF dan FAR, namun hal yang menjadi inti dari perjanjian ini ialah Hutu harus berdamai dengan Tutsi dan membagi kekuasaan bersama dalam Rwanda.<sup>94</sup> Akan tetapi tidak sedikit pula elit dan milisi-milisi Hutu yang menantang perjanjian tersebut. Hal ini dikarenakan adanya propaganda yang diciptakan elit Hutu membuat golongan Hutu lainnya merasa terinsekuritisasi apabila berdamai dengan Tutsi semenjak proses perdamaian itu berjalan. Belum lagi ditambah dengan krisis meningkatnya populasi Rwanda yang menyebabkan lahan semakin berkurang untuk ditinggali. Dari hal itu saja telah melahirkan asumsi baru yang menganggap apabila Tutsi kembali memasuki Rwanda, dengan lahan yang terbatas maka tidak mungkin dihindari akan terjadinya konflik ataupun sengketa mengenai perebutan lahan bersama Hutu.

Berbeda pula respon penentangan yang tunjukan oleh ekstrimis Hutu terhadap perjanjian perdamaian tersebut. Penulis melihat ada dua strategi yang mereka gunakan, *pertama* golongan ekstrimis Hutu membentuk sebuah kelompok rahasia yang bernama *huigiashu* dengan tujuan untuk melakukan penyusupan kedalam RPF agar dapat melemahkan pergerakan mereka secara internal,<sup>95</sup> dilain sisi pula *amasashu* melakukan suplai senjata terhadap kelompok-kelompok milisi Hutu dengan tujuan sebagai antisipasi apabila terjadi konflik baru lagi.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Sellström and Wohlgemuth, *Op. Cit.*, hal 41-43.

<sup>95</sup> *Amasasu* dalam bahasa Afrika yang berarti peluru, dibentuk oleh para petinggi golongan ekstrimis Hutu yang juga merupakan anggota militer FAR didalam sistem kemiliteran yang ada di Rwanda. Selain bertujuan untuk menyusupi RPF, *amasasu* juga menebar teror serta mengejar para Tutsi yang dianggap berpengaruh dalam pergerakannya untuk mendapatkan kembali ketoritasan etnis Tutsi.

<sup>96</sup> Organization of African Unity (International Panel of Eminent Personalities to Investigate the 1994 Genocide in Rwanda and the Surrounding Events), July 2000, *Rwanda: The Preventable*

Kemudian *kedua*, pihak ekstrimis melancarkan teror dan propaganda kebencian yang rasis dengan tujuan utama sebagai alat untuk menghapuskan Tutsi dari Rwanda. Dari propaganda rasis inilah yang menjadi penggerak utama Hutu sipil semakin merasa terancam apabila Tutsi kembali mendapatkan posisi dalam Rwanda dan dari hal tersebut pula semakin memperluas jurang kebencian yang ada.

Menyebarnya propaganda ini memiliki hubungan erat dengan dua media nasional Rwanda sebagai alat penyebarannya, yaitu *Radio Télévision Libres des Mille Collines* atau yang sering dikenal sebagai RLTM yang diciptakan pada tahun 1993 dan surat kabar radikal yang bernama *Kangura* yang telah terlebih dahulu lahir pada tahun 1990.<sup>97</sup> Kedua media ini sering disebut sebagai penyebab genosida 1994, akan tetapi banyaknya analisis dari para pakar genosida Rwanda menyebutkan bahwa dua media tersebut hanya dijadikan sebagai alat dalam jalannya genosida bukan sebagai penyebab ataupun faktor, karena anggapan mengenai genosida sendiripun akan tetap terjadi meskipun dengan tidak adanya kedua media tersebut.<sup>98</sup>

Dalam propaganda yang tersebar terdapat pula dua regulasi. *Pertama* propaganda yang ada diatur dalam bentuk kebijakan sosial rasis tradisional yang telah diperbaharui dalam generasi-generasi selanjutnya yang akan menjalani. *Kedua*, perubahan yang ada dalam kondisi sosial dan politik Rwanda dari masa kemerdekaan yang dilakukan oleh Hutu tidak lagi dianggap sebagai faktor yang

---

*Genocide*, Rwanda: IPEP, hal 42, dalam <http://www.refworld.org/pdfid/4d1da8752.pdf> diakses pada 17 Maret 2017 pukul 17:29 WIB

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 44.



menyebabkan mobilisasi politik, sehingga propaganda yang ada hanya didasari oleh argumen-argumen yang diciptakan oleh ekstrimis Hutu yang kemudian diharapkan menjadi sebuah alat untuk menggagal seluruh Hutu bersatu dan menciptakan *Hutu power* dalam membasmi Tutsi.<sup>99</sup>

Berangkat dari hal tersebut, RLTM mempunyai pula dua tujuan yang dikedepankan dalam penyiarannya, *pertama* mempererat hubungan antar Hutu demi menciptakan semangat rasisme terhadap Tutsi, *kedua* bertujuan untuk melegitimasi penghapusan Tutsi dari Rwanda yang wajib dilakukan oleh Hutu sebagai mayoritas.<sup>100</sup> Penulis melihat pula peran dari kedua media ini sangat berkontribusi besar dalam mengantarkan problematika yang ada menuju ke genosida 1994. Pasalnya melalui RLTM dalam penyiarannya selalu dibumbui dengan pesan dan kata-kata yang bersifat simbolik ataupun sebuah kode yang diartikan dan ditujukan kepada etnis Tutsi. Seperti kata *cockroach* yang berarti kecoa untuk menggantikan penyebutan etnis Tutsi, *let's cut the tall trees* yang memiliki maksud sebagai seruan untuk melakukan pembantaian terhadap Tutsi apabila sewaktu-waktu konflik telah dimulai.<sup>101</sup>

Hal lain yang menjadi perhatian penulis berada pada media cetak *Kangura*, seperti propaganda pertama yang tersebar ketika penandatanganan perjanjian perdamaian yang di gagas oleh ekstrimis Hutu melalui media ini

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Annan, *Op. Cit.*, hal 53.

<sup>101</sup> Walaupun hampir disemua sumber ataupun hasil analisis para pakar, penulis jarang mendapati adanya bukti penyiaran radio secara eksplisit, kecuali hasil analisa penulis dari film-film mengenai Rwanda, seperti dalam film *Hotel Rwanda* yang diluncurkan pada tahun 2004, dimana pada film ini unsur media sangat kental mewarnai propaganda dan jalannya genosida 1994, dan penulis mendapati kalimat atau kata-kata yang dijadikan sebagai simbol maupun kode yang digunakan RLTM dari film tersebut.

mengatakan bahwa Tutsi sedang mempersiapkan strategi perang, dan akan menghabisi Hutu hingga tidak tersisa di Rwanda.<sup>102</sup> Hal ini yang menggalakan milisi-milisi Hutu untuk melakukan persiapan dan penyusunan strategi perang apabila hal tersebut benar terjadi.<sup>103</sup> Kemudian hal lain yang tidak dapat dilakukan oleh RLTM dapat *Kangura* lakukan, seperti penerbitan pornografi dalam bentuk kartun yang menggambarkan perempuan Tutsi sebagai perusak laki-laki Hutu dimana tujuan dari hal tersebut agar laki-laki Hutu untuk menjaga kemurniannya agar tidak terkontaminasi oleh Tutsi perempuan, dan kartun yang menggambarkan bahwa Hutu mengalami penderitaan karena disebabkan Tutsi, serta bentuk-bentuk propaganda visual lainnya.<sup>104</sup>

Sebagaimana penyebab dan pemicu konflik Rwanda ini dapat dilihat melalui empat faktor yang telah penulis paparkan dengan menggunakan *root causes* model Brown. Tiga konflik pengantar sebelum terjadinya genosida dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan seperti struktural, budaya, dan sistem politik yang telah berubah dan diperbaharui oleh pihak kolonial yang kemudian menjadi sistem dominan bagi Tutsi dalam kontrol kuasanya kepada Hutu di Rwanda, selain itu pula krisis ekonomi, populasi yang terus meningkat, dan keterbatasan lahan agrikultur maupun sebagai tempat untuk ditinggali menjadi gesekan tersendiri antara etnis dengan etnis dan etnis dengan pemerintah. Atas kompleksnya permasalahan yang terjadi, tidak mengejutkan bahwa Rwanda dianggap sebagai *weak state* karena tidak dapat mengatasi polemik problematika

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal 62.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal 63.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal 64-68.

yang terjadi sehingga menjadikan pula Rwanda sebagai *failed state* di kacamata dunia internasional.<sup>105</sup>

Kemudian, tipologi konflik Rwanda yang pada awalnya hanya merupakan perseteruan diantara dua etnis karena adanya diskriminasi dan tindakan opresif dalam keotoritasan etnis pada era kolonial hingga demoktratisasi berubah menjadi perebutan kuasa dan posisi hirarki pada masa Rwanda mengalami transisi, namun dalam tiga gelombang konflik yang terjadi mengantarkan probelmatika yang masih tersisa menjadi sebuah genosida pada tahun 1994, dimana dalam jalannya genosida ini menggunakan unsur kekerasan yang berbasis gender. Digunakannya unsur tersebut karena adanya propaganda yang mendoktrin Hutu sipil maupun milisi Hutu untuk menjadikan perempuan Tutsi sebagai prioritas utama mereka dalam keinginan untuk menghapuskan Tutsi dari Rwanda, akan tetapi lebih diperparah karena bukan hanya perempuan Tutsi yang menjadi target melainkan Hutu perempuan pula akan bernasib sama apabila tidak mengikuti perintah dan aturan yang tertulis dalam *10 Hutu Commandements* maupun tidak berpartisipasi dalam genosida 1994.

### **2. 3. Gender Based Violence Sebagai Strategi Genosida**

Kekerasan berbasis gender memang bukanlah suatu hal maupun fenomena baru, akan tetapi prakteknya telah ada semenjak sebelum masyarakat kuno mengenal proses modernisasi dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>105</sup> Kim Aoral, *Rwanda's Gone from Failed State to Amongst Africa's Most Successful*: William Nkurunziza, Times of India, dalam <http://timesofindia.indiatimes.com/interviews/Rwandas-gone-from-failed-state-to-amongst-Africas-most-successful-Williams-Nkurunziza/articleshow/19432156.cms> diakses pada 18 Maret 2017 pukul 09:11 WIB

erat kaitannya melibatkan unsur diskriminasi satu sama lain berdasarkan jenis kelamin.<sup>106</sup> Dalam konflik Rwanda pada tahun 1994, kekerasan berbasis gender digunakan sebagai strategi dalam genosida. Hal tersebut terlahir dalam adanya kombinasi doktrin dan propaganda ekstrimis Hutu yang tertuang dalam *10 Hutu Commandements*, dimana dalam sepuluh perintah tersebut bersifat mutlak untuk dipatuhi oleh seluruh golongan maupun kelas Hutu selama proses berlangsungnya genosida.<sup>107</sup> Selain itu, propaganda ini bersifat mendesak dan mengharuskan Hutu untuk melakukan tindakan apapun yang menjadikan perempuan Tutsi sebagai target prioritasnya.

Di lain sisi, menurut pandangan Alison Des Forges semenjak Hutu memperoleh kuasanya atas Rwanda para elit telah mempersiapkan untuk menggunakan serangan fisik maupun kekerasan verbal untuk mencapai tujuan mereka dalam melengserkan posisi Tutsi.<sup>108</sup> Sehingga tidak heran begitu tewasnya presiden Habyarimana pada insiden jatuhnya pesawat yang ia tumpangi dan sebelumnya ditambah pula dengan adanya sepuluh perintah yang wajib dipatuhi, Hutu milisi maupun sipil tanpa menunggu perintah sontak melakukan pembantaian besar-besaran dan perkosaan masal terhadap Tutsi.<sup>109</sup> Penulis berargumentasi pula bahwa sepuluh perintah yang diterbitkan ini sangatlah strategis paska invasi 1990 berakhir karena merupakan upaya balas dendam namun dikemas melalui bingkai propaganda, sehingga dalam penyebarannya

---

<sup>106</sup> Djamba and Kimuna, *Op. Cit.*, introduction.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Nancy Sai, *Rwanda, Women Under Siege*, dalam <http://www.womenundersiegeproject.org/conflicts/profile/rwanda> pada tanggal 3 April 2017 pukul 14:11 WIB

<sup>109</sup> *Ibid.*

selalu melahirkan asumsi-asumsi baru mengenai kebencian dan penyalahan terhadap Tutsi. Sementara di lain hal, sepuluh perintah ini sengaja di provokasi dengan artian ditujukan untuk menghasut perpecahan dan meninggikan intensitas kebencian terhadap Tutsi, alhasil dalam kurun waktu empat tahun sebelum genosida, nilai-nilai ataupun aturan yang berada di sepuluh perintah tersebut terimplementasi dengan agresif dalam pribadi etnis Hutu.

Kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam genosida erat kaitannya dengan *10 Hutu Commandements* yang diterbitkan oleh *Kangura* tiga bulan setelah invasi RPF berakhir pada tahun 1990 dan secara spesifik propaganda yang terlihat melalui perintah tersebut menyebutkan bahwa setiap Hutu yang menikahi perempuan Tutsi maupun melakukan hubungan bisnis kerja dianggap sebagai penghianat etnis, dan setiap Hutu wajib untuk mempertahankan kemurnian etnisnya agar tidak terkontaminasi oleh Tutsi.<sup>110</sup> Di luar dari makna yang tersirat dalam perintah tersebut, dilakukan pula kampanye secara langsung dengan melibatkan unsur pornografi yang ditujukan sebagai penghinaan terhadap perempuan Tutsi, serta pesan-pesan maupun kalimat simbolis sebagai doktrin yang disiarkan melalui RLTM.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> African Unity, *Op. Cit.*, hal 44.

<sup>111</sup> *Ibid.*

## Gambar 2.1 Kangura No. 6, *10 Hutu Commandements*<sup>112</sup>

### The Ten Commandments [of the Bahutu]

1. Every Hutu male should know that Tutsi women, wherever they may be, are working in the pay of their Tutsi ethnic group. Consequently, shall be deemed a traitor:
  - Any Hutu male who marries a Tutsi woman;
  - Any Hutu male who keeps a Tutsi concubine;
  - Any Hutu male who makes a Tutsi woman his secretary or protégée.
2. Every Hutu male must know that our Hutu daughters are more dignified and conscientious in their role of woman, wife or mother. Are they not pretty, good secretaries and more honest!
3. Hutu women, be vigilant and bring your husbands, brothers and sons back to their senses.
4. Every Hutu male must know that all Tutsi are dishonest in their business dealings. They are only seeking their ethnic supremacy. "Time will tell." Shall be considered a traitor, any Hutu male:
  - who enters into a business partnership with Tutsis;
  - who invests his money or State money in a Tutsi company;
  - who lends to, or borrows from, a Tutsi;
  - who grants business favors to Tutsis (granting of important licenses, bank loans, building plots, public tenders...) is a traitor.
5. Strategic positions in the political, administrative, economic, military and security domain should, to a large extent, be entrusted to Hutus.
6. In the education sector (pupils, students, teachers) must be in the majority Hutu.
7. The Rwandan Armed Forces should be exclusively Hutu. That is the lesson we learned from the October 1990 war. No soldier must marry a Tutsi woman.
8. Hutus must cease having pity for the Tutsi.
9. The Hutu male, wherever he may be, must be united, in solidarity and be concerned about the fate of their Hutu brothers;
  - The Hutu at home and abroad must constantly seek friends and allies for the Hutu Cause, beginning with our Bantu brothers;
  - They must constantly counteract Tutsi propaganda;
  - The Hutu must be firm and vigilant towards their common Tutsi enemy.
10. The 1959 social revolution, the 1961 referendum and the Hutu ideology must be taught to Hutus at all levels. Every Hutu must propagate the present ideology widely. Any Hutu who persecutes his Hutu brother for having read, disseminated and taught this ideology shall be deemed a traitor.

Dalam gambar diatas, penulis menganalisis tiga perintah utama diletakan secara berurutan oleh ekstrimis Hutu dengan tujuan untuk memberikan gambaran bahwa perempuan Tutsi mempunyai tanggung jawab pertama untuk disalahkan dan dilenyapkan. Pada perintah nomor *satu*, ekstrimis Hutu mencoba untuk memproyeksikan perempuan Tutsi sebagai seorang penghianat walaupun telah mempunyai hubungan kerjasama ataupun menjadi istri dari seorang Hutu laki-laki. Dilain hal proyeksi kata penghianat ini mencoba untuk melunturkan rasa percaya yang telah terbangun sebelumnya antara etnis Hutu dan Tutsi, sehingga tidak mengherankan ketika genosida terjadi, terdapat tetangga yang merupakan

<sup>112</sup> Kangura, No 6, *Appeal to The Bahutu Consience: The Hutu Ten Commandements*, dalam <http://www.rwandafile.com/Kangura/k06a.html> diakses pada tanggal 3 April 2017 pukul 14:31 WIB

Hutu menyerang tetangganya sendiri yang merupakan Tutsi yang sebelumnya mereka hidup berdampingan dengan damai, dan bahkan seorang suami Hutu membunuh istrinya sendiri yang merupakan Tutsi. Pada perintah nomor *dua* dan *tiga* berawal dari adanya asumsi yang berkembang dari pemikiran para ekstrimis Hutu yang menganggap bahwa perempuan Tutsi merupakan sebuah bentuk sarana ataupun alat untuk mengendalikan masyarakat Hutu yang notabennya adalah laki-laki atas posisi hirarki sosial mereka.

Apabila melihat kembali *Hamitic thesis* di era kolonialisasi, terciptanya asumsi ini dipengaruhi oleh hal tersebut, dimana *Hamitic thesis* tidak saja melahirkan perbedaan mengenai Tutsi dan Hutu tetapi juga mengkristalisasi perbedaan karakteristik mengenai gender yang turut dikembangkan, sehingga perempuan Tutsi dipandang jauh lebih sempurna dan cantik daripada perempuan Hutu dan menyebabkan laki-laki Hutu lebih dominan untuk memilihnya sebagai istri maupun selir.<sup>113</sup> Oleh sebab itu pada perintah nomor *tiga* ini, ekstrimis Hutu juga mencoba mempropaganda Hutu perempuan untuk menimbulkan rasa benci terhadap Tutsi perempuan atas adanya stereotipe kesempurnaan maupun kecantikan yang mereka miliki tersebut, dan juga dengan tujuan agar Hutu perempuan dapat turut berpartisipasi untuk menghapuskan Tutsi perempuan dalam genosida.

Adapun penulis mendapati banyaknya pakar genosida Rwanda maupun dalam literatur lainnya yang menyebutkan tiga perintah ini dipandang sebagai kekerasan berbasis gender, namun penulis melihat lagi kepada perintah nomor

---

<sup>113</sup> Refstedt, *Op. Cit.*, hal 71.

*tujuh* dimana perintah ini dapat menjadi salah satu faktor tambahan bagi tentara FAR untuk menciptakan jarak terhadap perempuan Tutsi dan tidak menikahnya. Penulis berargumentasi ditujukannya perintah ini kepada tentara FAR agar menumbuhkan agresivitas dalam upaya balas dendam mereka terhadap RPF dengan menjadikan perempuan Tutsi sebagai objek mereka, dimana hal ini dilatarbelakangi pula oleh adanya propaganda yang menggambarkan bahwa RPF memperkosa maupun membunuh perempuan-perempuan Hutu ataupun istri-istri dari tentara FAR dalam invasi 1990.<sup>114</sup> Propaganda ini tersebar dalam bentuk karikatur ekstrim yang diterbitkan oleh *Kangura* dimana penulis tidak bisa menempatkan dalam bagian ini karena permasalahan muatan. Secara eksplisit sepuluh perintah ini mengilustrasikan bahwa Tutsi adalah musuh terbesar bagi Hutu, dan sepuluh perintah ini diupayakan pula untuk memanipulasi etnis Hutu kembali ke masa transisi kemerdekaan dimana Hutu yang tertindas harus bangkit dan mempunyai hak serta tugas untuk memusnahkan Tutsi dari Rwanda agar memperoleh kemerdekaan etnis mereka.<sup>115</sup>

Pada umumnya kekerasan berbasis gender yang terjadi di Rwanda dipengaruhi oleh adanya *10 Hutu Commandements* yang harus diterapkan, dan juga kebijakan-kebijakan anti Tutsi lainnya yang turut menjadi propaganda kekerasan, akan tetapi hal lain yang turut mendasari terjadinya kekerasan berbasis gender dalam genosida ini dikarenakan adanya budaya patriarki di Afrika, dimana segala bentuk kekerasan terhadap perempuan hanya dipandang sebagai bentuk

---

<sup>114</sup> D. Seth Wilson, *Navigating The Dark Waters Of Evil: The Roles Of Colonial Interference, Propaganda, and Obedience in The 1994 Rwandan Genocide*, Vol 1, Issue 1, March 2012, United State: Troy University, hal 3, dalam <https://journals.troy.edu/index.php/test/article/download/8/3> pada tanggal 3 April 2017 pukul 16:22 WIB

<sup>115</sup> *Ibid.*



kekerasan domestik saja dan bersifat normal.<sup>116</sup> Dengan kata lain, kekerasan tersebut bersifat wajar saja ketika dilakukan laki-laki terhadap perempuan, entah dengan tujuan agar memberikan pelajaran bagi perempuan ataupun membuat perempuan tersebut tetap mematuhi perintah laki-laki tersebut. Adanya budaya patriarki yang tumbuh subur ini mengakibatkan perempuan selalu terobjektifikasi atas segala bentuk kesalahan baik yang disebabkan dari dirinya sendiri ataupun dari orang sekitarnya, sehingga tidak mengherankan dengan adanya budaya seperti ini diadopsi kembali dan dikembangkan oleh ekstrimis Hutu dalam genosida dan menjadikannya sebagai sebuah strategi untuk menaklukkan Tutsi.

Selanjutnya, terkait mengapa peran gender dianggap sangat berpengaruh dalam genosida ini disebabkan oleh adanya stereotipe gender yang berkembang, seperti yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, dimana perempuan dipandang sebagai sosok individu yang lemah dan menjadikannya sebagai target yang mudah untuk ditaklukan, kemudian posisi gender perempuan yang diserang ini merupakan representasi gender laki-laki mereka yang dianggap tidak bisa melindunginya. Dalam konteks Rwanda, kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam genosida tidak saja ditujukan sebagai penghapusan etnis Tutsi saja, tetapi juga menyimbolkan laki-laki Tutsi yang tidak bisa memberikan wadah perlindungan dan menjamin keselamatan bagi perempuan mereka, sehingga dari hal tersebut menyebabkan perempuan dalam ranah konflik maupun genosida lebih rentan untuk diserang. Oleh sebab itu kekerasan berbasis gender dipilih oleh ekstrimis Hutu untuk menjadi strategi yang ampuh dalam menyerang lawan

---

<sup>116</sup> Djamba and Kimuna, *Op. Cit.*, hal 50.

mereka, karena tidak saja bersifat menakutkan tetapi juga membawa stigma-stigma sosial ataupun pesan simbolis kepada musuh yang kalah dan dianggap lemah.

#### **2. 4. *Sexual Violence* Sebagai Instrumen Dalam Genosida**

Kekerasan seksual secara umum didefinisikan sebagai tindakan seksual alami yang dipaksakan melalui ancaman kekerasan dan adanya pengambilan keuntungan dari pihak lawan ataupun korban.<sup>117</sup> Pada umumnya kekerasan seksual yang terjadi berupa tindakan perkosaan terhadap satu individu yang menjadi target, namun apabila hal tersebut terjadi dalam konteks konflik bersenjata ataupun genosida tindakan kekerasan seksual dan perkosaan dilakukan tidak saja secara individu melainkan masal, dan terdapat pula bentuk lain dari tindakan kekerasan seksual yang digunakan sebagai instrumen dalam konflik bersenjata seperti perbudakan seksual, prostitusi paksa, dan penghamilan paksaan.<sup>118</sup> Sehingga dapat dilihat apabila suatu konflik bersenjata maupun genosida yang sebelumnya turut mengaplikasikan kekerasan berbasis gender dalam prakteknya akan turut menggunakan kekerasan seksual sebagai instrumen tambahan, seperti yang terjadi dalam konteks genosida Rwanda.

Genosida yang terjadi di Rwanda memiliki substansi konflik etnis yang turut menggunakan kekerasan seksual dan perkosaan sebagai senjata untuk menghancurkan budaya dan keamanan bagi etnis yang menjadi sasaran, sehingga

---

<sup>117</sup> ICRC, *Sexual Violence in Armed Conflict*, International Review of the Red Cross; Humanitarian Debate: Law, Policy, Action, Vol 96, Number 894, Summer 2014, hal 428, dalam <https://www.icrc.org/en/download/file/12161/irrc-894-sexual-violence-in-armed-conflict.pdf> diakses pada tanggal 6 April 2017 pukul 19:02 WIB

<sup>118</sup> *Ibid.*

hal ini dapat dikatakan pula sebagai salah satu bentuk dari tindakan *ethnic cleansing* karena tindakan tersebut diarahkan secara langsung kepada etnis Tutsi.<sup>119</sup> Sementara tindakan pembersihan etnis tersendiri didefinisikan sebagai bentuk tindakan pengusiran masal maupun pembantaian terhadap etnis tertentu yang tidak diinginkan oleh etnis lain yang berada disekitarnya.<sup>120</sup>

Lebih lanjut, walaupun Hutu sipil dan milisi tidak diberikan perintah secara langsung untuk melakukan tindakan perkosaan terhadap perempuan Tutsi selama genosida tetapi secara otomatis pandangan mereka telah terkonstruksi sendiri melalui adanya propaganda ekstrim, doktrin, dan karikatur porno perempuan Tutsi yang di terbitkan oleh media lokal Rwanda. Sehingga dari hal tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pandangan Hutu laki-laki di proyeksikan sendiri dari penyebaran propaganda sebelum pecahnya genosida dimana perempuan Tutsi dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman ataupun gangguan yang harus dibersihkan dalam stabilitas tatanan sosial mereka.<sup>121</sup> Kemudian ditambah lagi dengan kata “*kubohoza*” yang berarti “*untuk membebaskan*” dalam bahasa Rwanda untuk pengertian sebenarnya, kata ini pada umumnya diselipkan dalam bentuk doktrin yang disampaikan dalam kampanye-kampanye yang dilakukan oleh ekstrimis Hutu, namun pada intinya kata ini

---

<sup>119</sup> Perkosaan dapat menjadi sebuah senjata dalam suatu perang, tindakan *ethnic cleansing*, dan genosida karena efeknya dapat mengurangi populasi tertentu melalui berbagai cara seksual yang praktis yang menghasilkan rasa takut, teror, membuat lawan menyerah kepada pihak yang menyerang, dan menjadikan lawan tunduk. Dilain hal, PBB turut mendefinisikan tindakan *ethnic cleansing* sebagai suatu tujuan dan kebijakan yang dirancang oleh satu kelompok etnis atau golongan lain yang bertujuan untuk menenyapkan etnis lawan dengan menggunakan unsur kekerasan serta teror yang berlangsung secara inspiratif dalam suatu wilayah geografis tertentu.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> Alison Des Forges, March 1999, *Leave None To Tell The Story: Genocide in Rwanda*, United State: Human Rights Watch, hal 16-17, dalam <https://www.hrw.org/reports/pdfs/r/rwanda/rwanda993.pdf> diakses pada tanggal 7 April 2017 pukul 13:21 WIB

diartikan sebagai sebuah tindakan untuk memperkosa.<sup>122</sup> Penulis melihat kesalahpahaman dalam pengartian kata ini dapat dikaitkan dengan *10 Hutu Commandements* dimana pada penjelasan sebelumnya empat dari 10 perintah tersebut memposisikan perempuan Tutsi sebagai salah satu alat untuk memperdayai laki-laki Hutu.

Perkosaan dalam konteks ini tidak saja digunakan sebagai alat kekerasan ataupun sebagai pemuas hasrat seksual pelakunya saja, tetapi juga memiliki tujuan seperti menciptakan rasa takut, bentuk penghinaan, teror dalam skala besar, dan menyingkirkan etnis lawan untuk terwujudnya kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>123</sup> Digunakannya perkosaan dalam konteks tersebut dikarenakan memiliki fungsi yang berbeda seperti senjata lain pada umumnya yang digunakan dalam medan perang yang membuat lawan terluka dan mati seketika, tetapi perkosaan memiliki implikasi dan substansi sosial tersendiri kepada korbannya.<sup>124</sup> Bahkan setelah konflik berakhir, perkosaan dan tindakan kekerasan seksual lainnya yang menyerang perempuan dan anak perempuan bersifat permanen baik secara fisik maupun psikologis. Seperti hadirnya trauma dan rasa malu sebagai korban perkosaan, kemudian korban melakukan tindakan pengucilan maupun dikucilkan dari keluarga dan masyarakatnya, terjangkitnya penyakit dari pelaku

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Human Rights Watch, 1996, *Shattered Lives: Sexual Violence During the Rwandan Genocide and its Aftermath*, dalam <https://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm> pada tanggal 6 April 2017 pukul 19:56 WIB

<sup>124</sup> Larissa Peltola, *Rape as a Weapon of War and Genocide: An Examination of its Historical and Contemporary Tactical Uses, Effect on Victims and Societies and Psychological Explanations*, hal 3, dalam <https://www.cmc.edu/sites/default/files/humanrights/Rape%20as%20a%20tool%20of%20war.pdf> pada tanggal 6 April 2017 pukul 20:21 WIB

perkosaan kepada korban selama tindakan tersebut terjadi, serta hadirnya bentuk stigma-stigma sosial lainnya kepada korban perkosaan.<sup>125</sup>

Kemudian melihat pandangan mengenai kekerasan seksual dan perkosaan yang dianggap sebagai bentuk dari *ethnic cleansing* yang brutal dan ekstrim dalam Rwanda menyebabkan perempuan Tutsi tidak saja diperkosa secara masal maupun individu, tetapi turut diperkosa dengan menggunakan benda-benda tumpul seperti gagang parang dan barel senjata serta digunakannya cairan keras yang disimburkan kearah bagian kewanitaan, adanya perbudakan seksual, penghamilan paksaan, dan mutilasi organ kewanitaan.<sup>126</sup> Tindakan tersebut tentu mempunyai substansi dan implikasi tersendiri dalam tujuannya seperti:<sup>127</sup>

1. Tindakan perkosaan yang turut menggunakan benda-benda tumpul seperti gagang parang dan ujung barel senjata bahkan terkadang menggunakan pula simburan air panas dan cairan asam ke daerah kewanitaan yang memiliki tujuan agar Tutsi perempuan tidak dapat bereproduksi lagi dan memutus tali keturunan etnis tutsi.
2. Tindakan mutilasi yang dilakukan kepada jari-jari dan hidung perempuan Tutsi bertujuan untuk merusak keunikan maupun kecantikan perempuan Tutsi yang sebelumnya tergambar dalam stereotipe gender perempuan Rwanda. Selain hal tersebut, adanya juga tindakan mutilasi yang dilakukan pada bagian payudara yang bertujuan agar Tutsi perempuan yang mempunyai anak di usia belia tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya. Secara keseluruhan tindakan mutilasi ini untuk membuat

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Human Rights Watch, *Op. Cit.*

<sup>127</sup> *Ibid.*

perempuan Tutsi mengalami kecacatan seumur hidup dan pula bertujuan untuk dimasa depan agar tidak ada laki-laki satupun yang menginginkannya sebagai seorang istri.<sup>128</sup>

3. Diperkosa dan dibiarkan hidup dengan tujuan agar perempuan tersebut hidup dengan rasa trauma dan malu, serta mengalami kesedihan yang mendalam.<sup>129</sup> Namun tidak sedikit pula perempuan Tutsi yang meninggal sehabis diperkosa.

Kemudian terdapat pula perkosaan yang dilakukan dengan cara lainnya seperti seorang ibu yang dipaksa menyaksikan anak perempuannya diperkosa oleh tentara milisi ataupun sebaliknya seorang anak yang dipaksa menyaksikan ibunya diperkosa, adapun juga korban yang diperkosa akan langsung dibunuh didepan keluarganya, dan korban perkosaan yang dibiarkan hidup begitu saja. Kemudian terdapat juga bentuk penghinaan lainnya seperti perempuan yang telah diperkosa kemudian dipaksa berjalan didepan publik tanpa mengenakan pakaian sehelaipun agar membuatnya merasakan kepedihan dan rasa malu yang mendalam.<sup>130</sup> Hal lainnya yang penulis dapati dari tindakan perkosaan ini merupakan sebuah sarana untuk melucuti kehormatan dan identitas perempuan Tutsi dalam hirarki sosialnya.

Di lain sisi, melihat para aktor kekerasan seksual dan perkosaan dalam genosida Rwanda tidak saja mencakup Hutu sipil dan milisi, tetapi juga dilakukan

---

<sup>128</sup> Mutilasi tubuh maupun organ reproduktif kewanitaan tidak hanya sebagai sarana untuk merusak fungsinya saja tetapi pula sebagai bentuk hukuman atas streotype kecantikan mereka yang membuat Hutu laki-laki terpikat dan memilih perempuan Tutsi sebagai pasangan hidup daripada perempuan Hutu tersendiri.

<sup>129</sup> Sai, *Op. Cit.*

<sup>130</sup> Refstedt, *Op. Cit.*, hal 72.

oleh kalangan militer. Tindakan perkosaan yang dijadikan sebagai sebuah senjata dalam kalangan militer memiliki tujuan sebagai:<sup>131</sup>

1. Mengintimidasi maupun menteror masyarakat sipil dan memaksa mereka untuk meninggalkan wilayah pemukiman mereka.
2. Untuk mempermalukan dan menghina lawan mereka dengan memperlihatkan bahwa mereka telah berhasil menundukan dan mengontrol perempuan-perempuan lawannya.
3. Dijadikan sebagai sebuah perangsang keberanian di medan pertempuran.

Dalam poin yang berada diatas, kekerasan seksual yang hadir dalam kalangan militer juga disebabkan dengan adanya ilustrasi sebagai sebuah kekuatan, kekuasaan, dominasi, dan keberanian, sehingga tindakan perkosaan ini dapat dianggap sebagai perilaku yang hadir dari adanya konsepsi maskulinitas.<sup>132</sup>

Terkait dengan adanya konstruksi maskulinitas yang hadir dalam kalangan militer tersebut dianggap penting oleh sebagian golongan karena memiliki fungsi bagi setiap individu tentara untuk mencapai status ataupun identitas sebagai sosok laki-laki pemberani dalam medan perang yang dihadapinya.<sup>133</sup> Dengan adanya konstruksi maskulinitas yang tumbuh seperti inilah yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik bersenjata ataupun genosida karena hadirnya keinginan individu untuk menggapai status dan dominasinya dalam agresi kemiliteran. Sementara itu apabila dikaitkan dengan

---

<sup>131</sup> Ruth Seifert, *War and Rape; Analytical Approaches*, 1993, WILPF (Women's International League for Peace and Freedom), hal 3-4, dalam [http://wilpf.org/wp-content/uploads/2014/08/1992\\_War\\_and\\_Rape.pdf](http://wilpf.org/wp-content/uploads/2014/08/1992_War_and_Rape.pdf) diakses pada tanggal 7 April 2017 pukul 09:16 WIB

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Cunningham, *Op. Cit.*, hal 284.

genosida etnis Rwanda, dilakukannya tindakan kekerasan seksual dan perkosaan oleh tentara FAR terhadap perempuan Tutsi berfungsi sebagai sebuah validasi ritual laki-laki sebagai seorang prajurit yang mencoba untuk mengaskan identitasnya terhadap lawan maupun status etnisnya.<sup>134</sup>

Sehingga dapat dilihat dalam konteks perang, konflik bersenjata, bahkan genosida sisi pemenang adalah sisi yang melakukan perkosaan, hal ini dapat dijelaskan melalui dua alasan spesifik pragmatis dan psikologi. *Pertama*, tentara yang menang akan melakukan perayaan pada wilayah yang berhasil ditaklukkannya dan dalam hal tersebut pasti ada perkosaan yang telah dilakukan. *Kedua*, perkosaan adalah sebuah tindakan untuk menaklukkan, dan pernyataan ini telah cukup jelas untuk dilihat.<sup>135</sup> Dari kedua alasan tersebut dapat menyimpulkan mengapa laki-laki terus melakukan perkosaan dalam medan perang. Di lain hal, tindakan perkosaan juga mengandung nilai dan pesan sosial terhadap laki-laki dari etnis perempuan yang menjadi korban, dimana laki-laki tersebut digambarkan sebagai laki-laki yang lemah dan tidak sanggup melindungi perempuan dari etnisnya, dan berbagai macam bentuk pesan ataupun penghinaan lainnya.<sup>136</sup>

Seperti dalam pandangan Brownmiller yang menganggap struktur kapasitas laki-laki untuk memperkosa dan struktur kerentanan perempuan yang menerimanya merupakan sebagai dasar fisiologi dari tindakan seksual itu

---

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Seifert, *Op. Cit.*, hal 2.

<sup>136</sup> Devorah West, *Radical Racial Ideals and Sexual Violence: Rwanda, Bosnia, and Nazi Germany*, Summer 2005, Brown University, hal 6-7, dalam [http://samoa.santafe.edu/media/cms\\_page\\_media/260/DevorahWest.pdf](http://samoa.santafe.edu/media/cms_page_media/260/DevorahWest.pdf) diakses pada tanggal 7 April 2017 pukul 10:38 WIB



sendiri.<sup>137</sup> Perkosaan tidak hanya menjadi hak prerogatif laki-laki saja tetapi menjadi sebuah senjata dasar untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan yang mengandung prinsip kehendak dan ketakutan. Oleh sebab itu perkosaan memerankan fungsi yang kritis dimana hal tersebut tidak saja proses intimidasi yang dilakukan dengan sadar tetapi juga sebagai alat laki-laki untuk menempatkan perempuan dalam ketakutan.<sup>138</sup>

Bagaimanapun tindakan kekerasan seksual dan perkosaan yang menimpa perempuan Rwanda tidak saja menyerang mereka secara pribadi tetapi juga secara *body politic*, dalam artian tidak saja menyebabkan perempuan Rwanda menderita tetapi juga menjadikan disintegrasi masyarakat dan kehidupan sosial Tutsi ikut mengalami kehancuran.<sup>139</sup> Hal ini dikarenakan asumsi ekstrimis Hutu terhadap politik tubuh menginterpretasikan Tutsi dalam pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kehidupan untuk membentuk kewarganegaraan mereka, dengan kata lain politik tubuh merupakan bentuk negosiasi kekuatan kepada tubuh Tutsi.<sup>140</sup>

Menjadi tambahan dalam konteks genosida ini, penulis memandang kekerasan seksual dan perkosaan yang terjadi bersifat sistematis. Sistematisnya serangan ini dikarenakan tidak saja menyerang perempuan dan anak perempuan Tutsi tetapi juga menyerang sebagian perempuan Hutu karena menikahi laki-laki

---

<sup>137</sup> Brownmiller, *Op. Cit.*, hal 13-14.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal 15.

<sup>139</sup> Branche and Virgili, *Op. Cit.*, hal 39-53.

<sup>140</sup> Konsep politik tubuh (*body politic*) juga digunakan dalam menganalisa bagaimana suatu pembuatan kebijakan negara ataupun ruang dan lembaga kepada perempuan, dan bagaimana rencana politik mengkonstruksi secara individual maupun kolektif bagi perempuan. Dalam skala globalnya politik tubuh digunakan untuk menganalisa hubungan terhadap kesepakatan internasional dan pembagian kerja global. Bagaimanapun, tubuh selalu menjadi subjek dari kehidupan sosial, budaya, ekonomi, definisi politik dan kebijakan.

Tutsi, menjalin hubungan pekerjaan dan turut membantu Tutsi, dan berafiliasinya mereka terhadap kelompok oposisi yang menentang ekstrimis Hutu, serta tidak berpartisipasi mereka dalam genosida.<sup>141</sup> Kemudian tindakan perkosaan sendiripun tidak saja mengarah kepada Hutu sendiri sebagai pelakunya tetapi tentara RPF juga turut melakukan, seperti berakhirnya genosida ketika tentara RPF berhasil menaklukkan kebrutalan rezim Hutu tentara RPF turut memperkosa perempuan-perempuan Hutu dengan andil sebagai bentuk balas dendam atas segala bentuk kekerasan seksual yang menimpa perempuan Tutsi dan rusaknya identitas perempuan etnis mereka.<sup>142</sup> Sehingga penulis melihat dalam konteks kekerasan seksual dan tindakan perkosaan ini dengan sengaja dilakukan sebagai sebuah strategi dan instrumen tambahan dalam merusak ataupun menyalahkan etnis lawan, ditambah lagi seperti penjelasan sebelumnya dimana tindakan perkosaan mempunyai implikasi tujuan tersendiri dalam dampak yang dihasilkannya.

Terlepas dari tindakan kekerasan seksual, perkosaan sendiri mempunyai konsekuensi terhadap korbannya. *Pertama*, dampak yang ditimbulkan dari perkosaan merupakan bagian dari keintegritasan fisik korban, membuatnya mengalami gangguan psikologis dan sulitnya proses penyembuhan emosi yang dihasilkan dari tindakan tersebut sehingga membuat korban tidak gampang melupakan kejadian yang menimpanya. *Kedua*, dampak lain yang diderita korban ialah bentuk pengucilan dari keluarga dan masyarakatnya, bahkan korban sendiri

---

<sup>141</sup> Human Rights Watch 1996, *Op. Cit.*

<sup>142</sup> Catharine Newbury and Hannah Baldwin, *Aftermath: Women in Postgenocide Rwanda*, Working Paper No. 303, July 2000, Center for Development Information and Evaluation U.S Agency for International Development, hal 3, dalam [http://pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/Pnacj323.pdf](http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacj323.pdf) diakses pada tanggal 6 Mei 2017 pukul 11:28 WIB

dapat mengisolasi dirinya atas rasa malu yang dideritanya, dan ditambah lagi munculnya berbagai bentuk stigma sosial dari masyarakat yang memandangnya sebagai korban perkosaan.<sup>143</sup>

Mengingat budaya Rwanda, perkosaan menjadi hal yang tabu dan korban perkosaan dipandang sangat memalukan oleh masyarakatnya walaupun hal tersebut bukan disebabkan oleh korban sendiri. Oleh sebab itu pada umumnya korban perempuan maupun anak perempuan yang telah diperkosa dan dibiarkan hidup lebih mempraktekan *silent law* seperti yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.<sup>144</sup> Kemudian adanya penghamilan paksaan juga merupakan dari konsekuensi tindakan perkosaan, dimana hal tersebut yang mendorong korban semakin mengucilkan dirinya dari masyarakat karena mengandung anak yang tidak diinginkannya dan yang bukan berasal dari darah etnisnya. Penghamilan paksaan juga ditujukan sebagai penyapu bersih keturunan atau darah murni etnis perempuan yang diperkosa.

Meskipun demikian, kekerasan seksual dan tindakan perkosaan yang dilakukan tidak saja membawa dampak yang besar terhadap perempuan baik secara fisik maupun mental yang meliputi dalam skala individu, etnis, bahkan tatanan sosialnya, tetapi juga menghadirkan bentuk sekutritisasi terhadap keseluruhan perempuan yang merupakan korban dari tindakan tersebut. Seperti dalam laporan Amnesty International pada tahun 2004 yang memberikan laporan sebesar 70 persen dari angka 250.000-500.000 perempuan yang diperkosa

---

<sup>143</sup> Brance and Virgili, *Op. Cit.*, hal 12.

<sup>144</sup> *Ibid.*

terjangkit penyakit HIV/AIDS.<sup>145</sup> Dari terjangkitnya mereka oleh penyakit tersebut menyebabkan permasalahan keamanan menjadi bertambah, mereka tidak saja harus menghadapi segala problematika diluar dari diri mereka setelah genosida usai, tetapi terhadap diri sendiri juga menjadi sebuah keharusan.

Mengingat lagi, genosida tersebut memakan angka korban yang tinggi dan menyisakan perempuan sebagai populasi yang mendominasi Rwanda pada saat itu menyebabkan mereka harus memerankan *multiple role* agar bertahan hidup.<sup>146</sup> Peran ganda ini turut dikatakan sebagai bentuk sekuritisasi mereka, pasalnya mereka tidak saja harus menghadapi penyakit HIV/AIDS yang mereka terima, tetapi dilain faktor mereka juga harus dapat bertahan hidup ketika mereka telah kehilangan suami atau keluarga yang merupakan tulang punggung mereka. Sehingga bisa dilihat beban yang ditarik oleh perempuan Rwanda tidak hanya saja sebatas hal yang telah menimpa mereka selama genosida tetapi masih berlanjut hingga genosida tersebut telah usai.

### Skema 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian



<sup>145</sup> Hirschauer, *Op. Cit.*, hal 139.

<sup>146</sup> *Ibid.*

Pada skema diatas penulis menempatkan sub bab 2.2, 2.3, dan 2.4 secara berurutan, dimana pada penjelasan yang telah di uraikan ketiga konteks ini saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian secara singkat pula skema diatas menjelaskan bahwa tipologi konflik Rwanda yang merupakan konflik etnis berubah menjadi sebuah genosida yang menggunakan kekerasan berbasis gender sebagai strategi dan kekerasan seksual sebagai instrumennya.

## **2. 5. Upaya Penyelesaian Genosida 1994**

Perlu diketahui, sebelum terjadinya genosida 1994, Rwanda telah mengalami gelombang konflik yang berulang terjadi. Hadirnya negosiasi ataupun solusi atas konflik tersebut tidak pernah menemukan titik terang dan resolusi yang ditawarkan hanya bersifat meredam permasalahan saja, tidak dapat menyelesaikan hingga dasarnya. Dengan kata lain dari adanya upaya-upaya tersebut hanya memangkas daun permasalahan dari konflik saja, tidak memotong akar permasalahan yang kemudian akar tersebut terus menumbuhkan batang pohon yang tinggi dan mencapai puncaknya yaitu genosida 1994. Sebelumnya pula penulis telah menjelaskan faktor penyebab dari problematika permasalahan yang muncul dan memetakan konflik-konflik yang telah terjadi di Rwanda, dan pada bagian ini secara eksplisit penulis menguraikan upaya apa saja yang dilakukan dalam penyelesaian genosida Rwanda.

Secara singkat dapat dilihat genosida yang terjadi disebabkan oleh adanya propaganda ekstrimis Hutu dan kebijakan anti Tutsi, akan tetapi sebelum terjadinya genosida ini telah ada upaya untuk membendungnya melalui perjanjian

*Arusha Accords* yang dibentuk ketika paska konflik 1990 berakhir. Dibentuknya kesepakatan damai ini pertamakali digagas oleh negara Belgia yang merupakan negara bekas pengkolonialisasi Rwanda, dan tidak luput pula hadirnya peran dari negara-negara lain beserta IO seperti OAU, PBB, Tanzania, Amerika, dan Perancis.<sup>147</sup> Negara Tanzania hadir mengajukan diri sebagai wadah fasilitator perundingan perdamaian yang membahas serangkaian negosiasi mengenai pembentukan aturan hukum baru, hak dan budaya antara etnis Hutu dan Tutsi, serta melakukan pembagian kekuasaan di semua institusi perpolitikan Rwanda, dan turut pula membahas proses reintegrasi para pengungsi Tutsi yang menyebar di negara-negara tetangga serta integrasi kemiliteran RPF dan FAR.<sup>148</sup>

Dalam jalannya negosiasi ini memakan waktu berbulan-bulan lamanya sehingga aksi konflik-konflik kecil sebagai simbol pembalasan di masing-masing bagian kemiliteran masih berlanjut. Dalam upaya negosiasi ini pula pada awalnya tidak mendapat respon yang baik dari pemerintahan Rwanda, bahkan Habyarimana hanya memandang upaya perjanjian perdamaian diantara etnis Hutu dan etnis Tutsi ini hanyalah sebagai omong kosong saja dan memerintahkan pemerintahan Rwanda agar tidak menanggapinya.<sup>149</sup>

Akan tetapi walaupun negosiasi ini memakan waktu yang cukup lama dalam proses perundingan dan upaya untuk meyakinkan pemerintahan Rwanda

---

<sup>147</sup> Organization of African Unity, *Op. Cit.*, hal 49.

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> Penulis memandang ketidakhirauan Habyarimana pada upaya perjanjian tersebut dikarenakan Habyarimana sendiri merupakan etnis Hutu yang menganut paham anti Tutsi, dan juga Habyarimana tumbuh besar melalui lingkungan propaganda dan doktrin kebencian Hutu terhadap Tutsi. Kemudian penulis berasumsi pula, apabila Habyarimana dengan cepat menanggapi dan menyetujui perjanjian tersebut maka dia akan kehilangan kepercayaan serta otoritas dari etnis Hutu sendiri karena pada nantinya akan hadir pandangan bahwa Habyarimana merupakan seorang penghianat Hutu karena telah memperbolehkan Tutsi memasuki Rwanda kembali.

beserta Habyarimana untuk menyetujui proses perdamaian ini, pada akhirnya Habyarimana merubah pandangannya dan menyetujui perjanjian tersebut.<sup>150</sup> Habyarimana semata-mata tidak hanya langsung melakukan persetujuan tersebut tanpa adanya faktor yang membuat ia sebelumnya merubah pikirannya, dimana dalam hal ini disebabkan oleh adanya desakan-desakan dari negara-negara yang turut mengintervensi upaya perdamaian ini beserta IO yang sebelumnya telah disebutkan. Namun, sebagian besar disebabkan oleh adanya ancaman dari negara-negara bilateral Rwanda yang akan mengembargo dan memutus segala bantuan luar negeri apabila Habyarimana tetap membiarkan terjadinya pembantaian diantara kedua etnis dalam negaranya.<sup>151</sup>

Kemudian, melihat suatu perjanjian ataupun kebijakan yang akan diberlakukan akan selalu menuai pro dan kontra yang hadir dari golongan-golongan yang berada dibawah rezim tersebut. Sehingga dalam konteks ini, ekstrimis Hutu mewakili sebagai golongan kontra terhadap perjanjian yang ingin diimplementasikan oleh pemerintahan Rwanda. Upaya penolakan yang dilakukan ekstrimis Hutu terlihat kentara dalam gencarnya mereka untuk mendoktrin Hutu lainnya agar menciptakan gerakan *Hutu power* demi mengemansipasi tindakan-tindakan yang diperlukan apabila suatu saat kondisi domestik berubah akibat adanya perjanjian damai tersebut, bahkan ekstrimis Hutu sendiri diyakini telah

---

<sup>150</sup> Mengenai pengesahan dan penandatanganan *Arusha Accords* ini tidak hanya dilakukan sekali saja, akan tetapi berkali-kali terjadi sepanjang tahun 1992 hingga 1993 yang merupakan pengesahan resmi perjanjian perdamaian ini. Kemudian mengenai implementasi aturan, hak, dan nilai-nilai lainnya yang berada dalam perjanjian tersebut dilakukan dari tahun 1993 hingga bulan-bulan terakhir sebelum pecahnya genosida 1994.

<sup>151</sup> *Ibid.*, hal 50.

menyusun strategi untuk melakukan pemusnahan masal terhadap etnis Tutsi.<sup>152</sup> Dari hal tersebut, apabila ditarik hingga 6 April 1994 dimana merupakan insiden terbunuhnya Habyarimana dalam pesawat yang ia tumpangi dapat dikatakan sebagai strategi ekstrimis Hutu untuk melancarkan aksinya karena adanya anggapan bahwa ketika orang nomor satu Rwanda telah tewas tanpa diketahui pelakunya maka pondasi pemerintahan akan rapuh dan akan mudah untuk menyalahkan etnis Tutsi sebagai pelaku dari insiden tersebut.<sup>153</sup>

Secara keseluruhan, pembantaian yang berlangsung selama 100 hari ini menjadi sorotan media dan dunia internasional sebagai fenomena pembantaian pertama di benua Afrika selepas dari *Holocaust* yang pernah terjadi di Eropa pada Perang Dunia II.<sup>154</sup> Dari brutalnya tindakan yang dilakukan hingga tingginya korban jiwa yang berjatuhan setiap hari mengundang simpati dari negara-negara yang berada di benua Afrika hingga negara-negara lainnya yang turut mempunyai hubungan diplomatis dengan Rwanda untuk melakukan intervensi demi menyudahi genosida yang terjadi. Untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan dan aktor apa saja yang turut berperan dalam menghentikan genosida ini penulis

---

<sup>152</sup> *Hutu power* mempunyai dua tanggapan, *pertama* dianggap sebagai sebuah supremasi ideologi yang dikemukakan oleh golongan ekstrimis Hutu yang berguna untuk meninggikan rezim anti Tutsi. *Kedua*, dianggap sebagai sebuah panggilan untuk seluruh etnis Hutu untuk melakukan suatu tindakan revolusi. *Hutu power* tidak saja berkontribusi dalam genosida 1994, tetapi sebelumnya pada tahun 1959 *Hutu power* telah terimplementasikan dengan adanya revolusi Hutu dimana etnis Hutu mencoba untuk mengambil alih pemerintahan dan menjadikan Rwanda sebagai negara republik.

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Howard Adelman and Astri Suhrke, 1996, *The International Respons to Conflict and Genocide: Lessons From the Rwanda Experience*, Early Warning and Conflict Management, Study 2, Copenhagen: Steering Committee of the Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, hal 68, dalam <https://www.oecd.org/derec/unitedstates/50189764.pdf> diakses pada 10 April 2017 pukul 21:44 WIB



membaginya dengan dua level dan dua bagian aktor yaitu *domestic level* dan *international level* serta *non state actor* dan *state actor*.

### 2. 5. 1. Level Domestik

*Non state actor* yang dapat dilihat berkontribusi dalam level domestik ialah RPF. Seperti pada penjelasan yang telah disebutkan, RPF merupakan kemiliteran etnis Tutsi yang dibentuk melalui para pengungsi etnis Tutsi yang berada di Uganda dan RPF sendiri mempunyai tugas untuk dapat mengembalikan etnis Tutsi kembali ke Rwanda. Sebelum April 1994, para petinggi RPF telah menyadari bahwa genosida akan terjadi dengan cara mengumpulkan segala bentuk informasi yang bersifat mengancam, memata-matai latihan kemiliteran FAR maupun ekstrimis Hutu.<sup>155</sup> Dalam antisipasi genosida tersebut, RPF berusaha melindungi etnis Tutsi dengan meminta aktor-aktor negara internasional agar mempercepat pengimplementasian *Arusha Accords* namun berbalik fakta bahwa proses tersebut berjalan sedikit lambat, sehingga ketika genosida telah pecah dan aksi pembunuhan dilakukan RPF memberikan pernyataan langsung kepada tentara FAR untuk menghentikan aksi tersebut akan tetapi panggilan tersebut tidak dihiraukan dan seketika RPF mengambil aksi cepat untuk turun tangan dalam menyelamatkan etnis Tutsi yang menjadi sasaran dalam genosida.<sup>156</sup>

Dilain sisi, RPF beranggapan pula bahwa masyarakat internasional akan membantu untuk mempertahankan keselamatan masyarakat sipil Rwanda ketika

---

<sup>155</sup> Human Rights Watch Report, *The Rwandan Patriotic Front*, dalam <https://www.hrw.org/reports/1999/rwanda/Geno15-8-03.htm> diakses pada 10 April 2017 pukul 15:52 WIB

<sup>156</sup> *Ibid.*

genosida berlangsung, namun ketika PBB maupun pemerintah dari negara-negara asing belum menunjukkan keinginan untuk mengintervensi pada tanggal 9 April 1994 RPF mengajukan tindakan cepat ataupun operasi bersama UNAMIR dengan memberikan masing-masing 300 personil untuk memberhentikan pembantaian yang sedang berlangsung, tetapi inisiatif RPF tersebut menjadi gagal karena UNAMIR melakukan penolakan terhadap hal tersebut dikarenakan UNAMIR tidak ingin menggunakan unsur kekerasan dalam upaya untuk menghentikan genosida dan dilain hal UNAMIR juga dibebankan untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara asing yang berada di Rwanda sehingga dalam hal ini RPF menghadapi genosida tanpa bantuan aktor lainnya.<sup>157</sup>

Hal lain yang lebih memprihatinkan ialah PBB beserta Dewan Keamanan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melihat aksi pembantaian yang sedang berlangsung, ditambah lagi PBB dan Dewan Keamanan menganggap kejadian ini tidak memberikan keuntungan bagi mereka apabila mereka yang secara langsung turun tangan, bahkan pembantaian ini hanya diasumsikan sebagai perang sipil biasa dan tingginya kematian warga sipil dalam hal tersebut dianggap sebagai produk murni peperangan domestik, oleh sebab itulah penanganan keamanan maupun upaya untuk menghentikan pembantaian ini berjalan cukup lambat hingga akhirnya memasuki 19 April 1994 *Human Rights Watch* menyatakan pembantaian tersebut ialah sebuah tindakan genosida.<sup>158</sup>

Melalui konteks perang yang sedang terjadi antara RPF melawan milisi Hutu maupun ekstrimis Hutu serta tentara FAR yang turut berpartisipasi, pada

---

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Michal Barnett, *Op. Cit.*, hal 8.

tanggal 12 April 1994 para pemimpin RPF mengambil kesimpulan dapat memenangkan peperangan ini sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak asing.<sup>159</sup> Hadirnya asumsi ini disebabkan RPF berhasil menaklukkan Rwanda bagian timur dari tangan milisi Hutu yang sedang melancarkan pembantaian terhadap etnis Tutsi yang bersembunyi. Sehingga selama hampir tiga bulan selepas dari insiden pertama pada 6 April, hanya RPF yang dapat dikatakan satu-satunya kekuatan yang signifikan dalam usaha untuk menghentikan genosida.<sup>160</sup>

RPF berhasil mengakhiri genosida dengan mengalahkan masyarakat sipil dan kemiliteran Rwanda yang turut berpartisipasi dalam genosida. Strategi penaklukan yang dilakukan dengan menyapu keseluruhan bagian timur hingga barat Rwanda dan pada tanggal 4 Juli 1994 RPF berhasil menduduki Kigali dan pada tanggal 19 Juli 1994 RPF membentuk pemerintahan sementara guna menstabilkan keadaan domestik.<sup>161</sup> Para pelaku genosida sebagian melarikan diri ke Democratic Republic Congo dan Tanzania, sebagian lainnya ditangkap dan dipenjara guna diadili atas tindakan genosida yang telah dilakukan.<sup>162</sup> Namun dalam kesuksesan RPF menghentikan genosida, RPF sendiri terkena tuduhan oleh PBB dalam menyalahgunakan kekuatan yang dibuktikan dalam usahanya untuk mengendalikan keadaan dengan membunuh warga sipil maupun yang bukan kombatan.<sup>163</sup> Sehingga RPF diyakini telah membunuh puluhan ribu masyarakat sipil selama genosida berlangsung dari bulan April hingga Juli 1994.

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Adelman and Suhrke, *Op. Cit.*, hal 44.

<sup>161</sup> *Ibid.*, hal 45.

<sup>162</sup> RPF; *History About Rwanda*, dalam <http://www.rwandahope.com/rpfhistory.pdf> diakses pada 10 April 2017 pukul 22:08 WIB

<sup>163</sup> Human Rights Watch Report, *Op. Cit.*

## 2. 5. 2. Level Internasional

Pada level internasional pertama terdapat *non state actor* yang turut berperan dalam penyelesaian genosida Rwanda, yaitu *United Nations Assistance Mission for Rwanda* (UNAMIR) yang dipayungi langsung oleh PBB dan dibentuk melalui resolusi 872 pada bulan Oktober 1993.<sup>164</sup> UNAMIR tersendiri merupakan sebuah bentuk operasi penjaga perdamaian berisikan satuan pasukan perdamaian yang disumbangkan dari beberapa negara-negara keanggotaan PBB.<sup>165</sup> Dalam pembentukan pertamanya, UNAMIR ditugaskan untuk dapat membantu pihak yang berseteru untuk berdamai dan memantau serta mendukung pemerintahan yang transisi, dengan kata lain UNAMIR hanya ditugaskan untuk mempermudah proses pengimplementasian perjanjian *Arusha*.<sup>166</sup>

Pada tanggal 30 Maret 1994, Dewan Keamanan mendapat informasi bahwa ketegangan yang terjadi di Rwanda terus meningkat dan Sekretaris Jenderal menyarankan agar UNAMIR tetap berada disana dengan cara memperpanjang mandat UNAMIR melalui PBB, sehingga pada tanggal 5 April 1994 satu hari sebelum pecahnya genosida Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 909 yang bertujuan untuk memperpanjang mandat UNAMIR hingga 29 Juli 1994. Di lain sisi ketika genosida pecah pada keesokan harinya, UNAMIR ditugaskan untuk menjaga keselamatan masyarakat sipil yang notabennya adalah etnis Tutsi

---

<sup>164</sup> UNAMIR Background, *Rwanda Summary*, dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unamirFT.htm> diakses pada 9 April 2017 pukul 08:22 WIB

<sup>165</sup> United Nations, *Security Council Resolution 872 (1993)*, dalam <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/540/63/PDF/N9354063.pdf?OpenElement> diakses pada 4 Agustus 2017 pukul 09:41 WIB

<sup>166</sup> UNAMIR Background, *Op. Cit.*

dari serangan-serangan yang dilakukan oleh etnis Hutu dengan tidak menggunakan unsur kekerasan sama sekali dalam pengamanannya.<sup>167</sup>

Kemudian ketika memasuki tanggal 21 April 1994, Dewan Keamanan mengambil langkah yang mengejutkan dengan menarik mundur sebagian besar pasukan UNAMIR yang sebelumnya berjumlah 2.500 personil menjadi 270 personil.<sup>168</sup> Langkah tersebut pula diiringi dengan keluarnya resolusi 912 yang menugaskan UNAMIR untuk menjamin terjadinya gencatan senjata diantara etnis yang sedang bertikai dan menjaga tetap menjaga keamanan.<sup>169</sup> Namun resolusi tersebut hanyalah alasan lain yang digunakan untuk memperkuat penarikan mundur sebagian besar personil UNAMIR dengan dalih agar pasukan UNAMIR dapat memfokuskan perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sipil Rwanda yang berlindung langsung dipusat perlindungan UNAMIR.<sup>170</sup>

Tidak logisnya alasan tersebut menghadirkan banyaknya asumsi dan bentuk protes dari negara-negara yang bersimpati kepada Rwanda terhadap Dewan Keamanan.<sup>171</sup> Namun pada akhirnya Dewan Keamanan dan PBB memberikan penjelasan bahwa pengurangan jumlah pasukan tersebut disebabkan oleh situasi yang sangat mengancam, dimana pasukan UNAMIR turut menjadi

---

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Howard Adelman and Astri Suhrke, 1999, *The Rwanda Crisis from Uganda to Zaire: The Path of Genocide*, New Jersey: Transaction Publishers, hal 124-125, dalam <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:276851/FULLTEXT01.pdf> diakses pada 11 April 2017 pukul 13:42 WIB

<sup>169</sup> United Nations, *Security Council Resolution 912 (1994)*, dalam <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/190/85/PDF/N9419085.pdf?OpenElement> diakses pada 4 Agustus 2017 pukul 09:52 WIB

<sup>170</sup> Penarikan mundur pasukan UNAMIR dalam jumlah besar ini pula dikarenakan Dewan Keamanan ingin menghindari terbunuhnya pasukan UNAMIR seperti sebelumnya dalam kasus penanganan perlindungan perdana menteri Rwanda Agathe Uwilingiyimana yang menyebabkan sepuluh pasukan Belgia terbunuh.

<sup>171</sup> Human Rights Watch Afrika, *Genocide In Rwanda April-May 1994*, Vol. 6, No. 4 (may 1994), hal 11, dalam <https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/RWANDA945.PDF> diakses pada 9 April 2017 pukul 09:03 WIB

target sasaran dari rencana ekstrimis Hutu dan PBB mengambil langkah cepat untuk melakukan pengurangan jumlah pasukan demi menghindari terbunuhnya pasukan UNAMIR.<sup>172</sup> Akan tetapi hingga genosida usai tidak ada satupun bukti yang memberikan kesaksian bahwa pasukan UNAMIR turut dijadikan sebagai sasaran dalam aksi genosida.<sup>173</sup>

Penulis menganggap dengan tindakan penarikan pasukan UNAMIR tersebut merupakan langkah yang buruk karena dengan jalannya genosida yang terjadi tanpa adanya pengamanan tambahan untuk masyarakat sipil membuat kondisi Rwanda semakin buruk dan pembunuhan tetap berlangsung. Hingga akhirnya memasuki 17 Mei 1994, PBB mengeluarkan resolusi 918 dengan memanggil bantuan internasional untuk menambah jumlah pasukan UNAMIR menjadi 5.500 personil agar dapat meningkatkan kontribusi pada keamanan dan perlindungan para masyarakat sipil serta para pengungsi, sehingga dalam penambahan pasukan UNAMIR kali ini menjadikannya sebagai pasukan UNAMIR II.<sup>174</sup> Namun hal tersebut memakan waktu yang tidak singkat, setidaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk memenuhi resolusi tersebut.<sup>175</sup>

Dilain sisi, penulis menemukan ketimpangan UNAMIR dalam perannya di genosida ini. UNAMIR yang awalnya diharapkan dapat menghalau dan menjaga perdamaian serta menjaga keselamatan masyarakat sipil Rwanda mengalami peralihan fungsi, sehingga peran UNAMIR dalam konteks ini dapat dikatakan sangat tidak efektif. Hal ini dikarenakan UNAMIR tidak saja dibebankan oleh

---

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> Adelman and Suhrke, *Op. Cit.*, hal 245.

<sup>175</sup> UNAMIR Background, *Op. Cit.*

tugasnya untuk menjamin keselamatan masyarakat sipil tetapi UNAMIR juga ditugaskan untuk lebih memprioritaskan keselamatan warga negara asing maupun keanggotaan PBB untuk mengevakuasi keluar dari Rwanda maupun memindahkan ke zona aman, sehingga tidak terkadang fokus terhadap masyarakat sipil atau etnis Tutsi menjadi berkurang dan bahkan terlupakan.<sup>176</sup>

Kemudian dalam banyaknya analisis menyebutkan bahwa terdapat banyak aktor negara-negara internasional yang turut memberikan simpat atas dilema yang diderita Rwanda pada tahun 1994, bahkan tidak sedikit pula negara asing lainnya maupun negara keanggotaan PBB yang turut melakukan upaya intervensi secara tidak langsung melalui Dewan Keamanan PBB untuk menyudahi pembantaian antar etnis ini. Namun, dalam konteks upaya penyelesaian yang dilakukan pada level internasional ini banyak mengalami ketimpangan seperti adanya keraguan dalam pengambilan kebijakan mengenai permasalahan krisis kemanusiaan maupun pelanggaran hak asasi manusia dalam pembantaian yang sedang berlangsung di Rwanda dan tidak konsekuensinya peran dimasing-masing aktor negara yang terlibat seperti analisis Alison Des Forges yang sedikitnya menyebutkan Amerika, Canada, Belgia, dan Perancis yang ikut terlibat dalam penyelesaian ini diluar dari IO yang sebelumnya telah disebutkan.<sup>177</sup> Akan tetapi, penulis melihat dan membandingkan dalam analisis lain yang menghasilkan argumentasi serta bukti kuat bahwa setidaknya Belgia dan Perancis yang berkontribusi besar dalam

---

<sup>176</sup> Michael Barnett, *The United Nations Security Council and Rwanda* (Expert Opinion Paper for the International Decision-Making in the Age of Genocide: Rwanda 1990-1994), June 1 2014, George Washington University, hal 5, dalam <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB472/Barnett,%20Michael%20-%20The%20United%20Nations%20Security%20Council%20and%20Rwanda.pdf> diakses pada 9 April 2017 pukul 17:23 WIB

<sup>177</sup> Human Rights Watch Africa, *Op. Cit.*, hal 12.

penyelesaian genosida Rwanda, dan bagi Rwanda sendiri hanya dapat mengandalkan dua negara ini sebagai peluangnya untuk melepaskan diri dari genosida.

Hal tersebut dapat dilihat melalui peran aktifnya Belgia sebagai pencetus pertama dalam *Arusha Accords* untuk menghalau terjadinya perpecahan kembali antara etnis Hutu dan etnis Tutsi hingga kemiliteran dimasing-masing etnis tersebut, kemudian berkontribusi besar dalam pembentukan pasukan UNAMIR dimana posisi Belgia dalam satuan pasukan perdamaian ini sebagai negara penyumbang pasukan terbesar sebanyak 800 personil selepas dari negara-negara lainnya yang turut menyumbangkan seperti Bangladesh, Ghana, dan Tunisia.<sup>178</sup> Dalam peran awalnya Belgia pada penyelesaian genosida ini memberikan harapan dan ekspektasi nyata bagi RPF, etnis Tutsi, maupun pemerintahan oposisi Rwanda untuk menghentikan pembantaian, namun semenjak terbunuhnya sepuluh pasukan Belgia dalam upayanya untuk mengamankan perdana menteri Agatha Uwilingiyimana, pihak Belgia mengalami dilema internal tersendiri apakah akan tetap terus membiarkan pasukannya dalam UNAMIR untuk melakukan pengamanan walaupun mempunyai konsekuensi terbunuhnya mereka dalam upaya tersebut, atau menarik mundur pasukan mereka demi keselamatan masing-masing individu pasukan.<sup>179</sup>

Pada kenyataannya semenjak insiden tersebut, pada 14 April pihak Belgia melakukan penarikan total pasukannya dari UNAMIR, oleh sebab itulah seperti yang penulis sebutkan dalam bagian sebelumnya mengenai resolusi PBB untuk

---

<sup>178</sup> Adelman and Suhrke, *Op. Cit.*, hal 256.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hal 259-260.



mengurangi jumlah pasukan UNAMIR disebabkan oleh hal ini.<sup>180</sup> Dalam hal tersebut tentu menjadikan kepercayaan RPF maupun Tutsi sipil berkurang terhadap pasukan UNAMIR, PBB, maupun Belgia sendiri karena mereka beranggapan aktor tersebut tidak konsekuensi dalam memberikan pertolongan mereka untuk menyudahi pembantaian ini.

Berbeda pula dengan Perancis, sebelum genosida pecah Perancis merupakan negara aliansi Rwanda dalam konteks rezim Habyarimana dan ekstrimis Hutu, dimana negara Perancis mempunyai peran dalam melatih kemiliteran tentara FAR dan sebagai negara yang mensuplai senjata bagi mereka yang terlibat diluar dari RPF maupun Tutsi.<sup>181</sup> Keberpihakan Perancis terhadap rezim Habyarimana ini dianggap RPF dan Tutsi sipil sebagai pendorong terjadinya genosida.<sup>182</sup> Namun, ketika genosida pecah Perancis mengalami perubahan kebijakan dimana sebelumnya ia membantu tentara FAR maupun ekstrimis Hutu dalam prosesnya terciptanya genosida berubah sebagai negara penolong untuk menghentikan genosida itu sendiri.<sup>183</sup>

Selama genosida berlangsung dan seluruh dunia internasional menyaksikannya, Perancis memutuskan untuk mengambil intervensi kemanusiaan dan dalam resolusi yang diberikan oleh PBB, Perancis diperbolehkan untuk mengintervensi Rwanda dibawah dari otoritas payung perpolitikan PBB, namun

---

<sup>180</sup> Des Forges, *Op. Cit.*, hal 16.

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*, hal 17.

<sup>183</sup> Kebijakan Perancis dalam mendukung rezim Habyarimana dimulai paska invasi RPF berakhir dan berjalan dari tahun 1990 hingga 1993 yang diperintahkan langsung oleh presiden François Mitterrand. Adapun kebijakan tersebut seperti memberikan penambahan pasukan dukungan yang sebelumnya 150 personil menjadi 700 personil dan dimandatkan untuk melindungi serta mendukung tentara FAR dalam menghadapi konfliknya dengan RPF, kemudian adanya penyediaan spesialis helikopter, transmisi, petugan intelejen, perwira artileri dimana dalam konteks ini ditujukan untuk meningkatkan keahlian tentara FAR.

untuk segala aksi tujuannya Perancis kerap menentukan sendiri aksinya tanpa meminta persetujuan PBB sebelumnya.<sup>184</sup> Kemudian pada akhir Mei 1994 terdapat diskusi agenda perpolitikan yang bertempat di Paris yang turut pula membahas isu Rwanda, alhasil dari diskusi tersebut membuat pemerintahan Perancis melahirkan keputusan untuk intervensi yang dikenal sebagai *Opération Turquoise*.<sup>185</sup>

Pada tanggal 20 Juni 1994 perdana menteri Perancis Allain Juppé membangun komunikasi bersama RPF dengan memberitahukan bahwa Perancis akan terlibat dalam operasi kemanusiaan untuk menyudahi genosida Rwanda dan akan memberikan pertolongan kepada RPF serta perlindungan kepada Tutsi sipil melalui *Opération Turquoise*.<sup>186</sup> Dalam operasi ini menyebutkan sedikitnya akan melibatkan 2.500 personil yang akan diterjunkan langsung di Rwanda dengan membawa ratusan kendaraan anti peluru, delapan helikopter Puma, dan senjata-senjata berat lainnya guna mendukung operasi tersebut. Melalui penjelasan operasi tersebut yang ditawarkan langsung kepada perwakilan RPF di Paris dan hanya tertulis dua lembar saja membuat RPF terkejut dan menimbulkan spekulasi mengenai keberhasilan atau tidaknya dalam operasi ini.<sup>187</sup>

Ketika operasi ini berjalan, keraguan RPF sebelumnya terhadap Perancis menjadi terpatahkan karena seperti yang telah dijanjikan pula operasi ini berjalan dengan cepat hingga pada tanggal 2 Juli 1994 Perancis telah menguasai seluruh wilayah barat Rwanda dimana wilayah tersebut setara dengan setengah wilayah

---

<sup>184</sup> Adelman and Suhrke 1999, *Op. Cit.*, hal 284.

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal 289.

<sup>187</sup> *Ibid.*, hal 290-291.

nasional Rwanda, dan memberitahukan bahwa wilayah tersebut merupakan zona aman bagi etnis Tutsi untuk mengungsi maupun menghindari terbunuhnya mereka dalam aksi genosida yang masih berlangsung.<sup>188</sup> Secara keseluruhan *Opération Turquoise* ini telah menyelesaikan segala problematika genosida Rwanda tanpa menimbulkan korban jiwa maupun pertikaian antara RPF dalam waktu dua bulan seperti yang dijanjikan dalam negosiasi penawaran bantuan.<sup>189</sup> Dalam perspektif kacamata internasional melihat upaya Perancis dalam menyelesaikan genosida ini merupakan sebagai tindakan penebusan atas sebelumnya kebijakan Perancis yang mendukung rezim Habyarimana dan ekstrimis Hutu dalam menghadapi RPF.<sup>190</sup>

Menjadi perhatian, walaupun banyaknya aktor-aktor negara yang terlibat baik secara langsung maupun tidak hanya menghasilkan Belgia dan Perancis yang dapat dikatakan telah berperan dalam upaya penyelesaian ini. Walaupun pihak Belgia hanya bertahan sesaat saja dalam berlangsungnya genosida tetapi telah cukup memberikan kontribusi bagi sumbangan pasukan yang diberikan dalam UNAMIR dan proses *Arusha Accords* sebelumnya, kemudian Perancis yang pada awalnya sangat bersinggungan bersama RPF berbalik arah dan melahirkan kebijakan untuk mengulurkan tangannya dalam menyelesaikan genosida. Selebihnya seperti intervensi PBB dalam membentuk pasukan UNAMIR tidak dapat dikatakan sebagai bentuk bantuan yang efisien dikarenakan UNAMIR mengalami peralihan peran se usai mandat maupun resolusi yang diberikan oleh PBB sendiri, dan terlambatnya kesadaran maupun bantuan dari negara-negara lain

---

<sup>188</sup> Adelman and Suhrke 1996, *Op. Cit.*, hal 53.

<sup>189</sup> *Ibid.*

<sup>190</sup> Terdapat asumsi internasional pula bahwa diluncurkannya *Opération Turquoise* ini sebagai upaya untuk menyelamatkan klien Perancis di Rwanda dari kekalahan total yaitu ekstrimis Hutu, FAR, dan rezim Habyarimana lainnya yang masih tersisa.

dalam hal ini menyebabkan RPF harus menghadapi rezim genosida yang sedang berlangsung sendirian tanpa ada bantuan sebelum hadirnya *Opération Turquoise* oleh Perancis.

**Tabel 2.3 Posisi Upaya Penyelesaian Genosida Rwanda**

| <i>Domestic Level</i>  | <i>International Level</i>   |
|--|--|
| <p><i>Non-state actor:</i><br/>1. RPF:<br/>Dalam langkah awalnya untuk meminimalisir genosida RPF melakukan pemantauan latihan kemiliteran FAR dan mengumpulkan segala bentuk informasi. Kemudian sebagai bentuk antisipasi, RPF meminta bantuan kepada aktor-aktor internasional agar dapat mempercepat pengimplementasian <i>Arusha Accords</i> demi meredam agresifnya pergerakan ekstrimis Hutu yang terus mencoba membantai etnis Tutsi. Namun genosida tetap saja terjadi dan menyisakan RPF sebagai satu-satunya aktor domestik yang dapat mengurangi intensitas pembunuhan yang berlangsung hingga berakhirnya genosida.</p> | <p><i>Non-state actor:</i><br/>1. UNAMIR:<br/>UNAMIR sebagai bentuk operasi penjaga perdamaian Rwanda mengalami peralihan peran dalam tugasnya. <i>Pertama</i>, UNAMIR ditugaskan untuk dapat membantu dan memantau proses pengimplementasian <i>Arusha</i>. <i>Kedua</i>, UNAMIR mendapat mandate ketika genosida pecah untuk menjaga keselamatan masyarakat sipil dari bentuk serangan yang terjadi. <i>Ketiga</i>, melalui resolusi 918 PBB pasukan UNAMIR bertambah menjadi 5.500 personil agar dapat meningkatkan keamanan dan perlindungan masyarakat sipil namun penambahan personil tersebut memakan waktu lama dan pembantaian tetap berlangsung. Secara keseluruhan peran UNAMIR tidak konsisten dan dalam tugasnya di Rwanda lebih memprioritaskan perlindungan serta evakuasi terhadap warga negara asing yang ingin keluar dari Rwanda maupun memindahkannya ke zona aman sehingga fokusnya terbagi dan masyarakat sipil Rwanda menjadi terlupakan.</p> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <p><i>State actor:</i></p> <p>-</p> | <p><i>State actor:</i></p> <p>1. Belgia:</p> <p>Peran Belgia dapat dilihat sebagai pencetus pertama <i>Arusha Accords</i> sebagai bentuk penghalau agar tidak terjadinya perpecahan diantara etnis Hutu dan Tutsi, kemudian Belgia turut berkontribusi sebagai negara penyumbang pasukan UNAMIR terbanyak yaitu sebesar 800 personil diantara negara-negara keanggotaan PBB lainnya yang turut menyumbangkan pasukan. Namun pada akhirnya Belgia mengendurkan pergerakannya untuk mengatasi genosida yang berlangsung dengan cara menarik mundur sebagian besar pasukannya dalam UNAMIR, hal tersebut dikarenakan insiden terbunuhnya 10 pasukan Belgia dalam upayanya untuk mengamankan Perdana Menteri Agatha Uwilingiyamana.</p> <p>2. Perancis:</p> <p>Perancis memiliki dua wajah dalam Rwanda. <i>Pertama</i>, Perancis merupakan negara aliansi Rwanda dalam konteks rezim Habyarimana dan ekstrimis Hutu dan berperan dalam melatih kemiliteran FAR serta sebagai pemasok senjata bagi Hutu. Namun ketika genosida pecah dan tidak banyak negara internasional yang dapat mengintervensi langsung untuk menghentikannya, Perancis mengubah haluan dengan melakukan <i>Opération Turquoise</i> yang melibatkan 2.500 personil dan persenjataan lengkap. Operasi tersebut berjalan cepat hingga memasuki tanggal 2 Juli 1994 pasukan Perancis berhasil menguasai seluruh wilayah barat Rwanda dan memberikan keamanan serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.</p> |
|-------------------------------------|---|